

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- c. bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI BALI TAHUN 2005–2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Gubernur.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH;
- c. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH;

- d. BAB IV SASARAN, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN; dan
- e. BAB V PENUTUP.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Dengan tidak adanya GBHN sesuai amandemen UUD 1945, maka untuk menghindari kekosongan dan menjaga kesinambungan pembangunan, disusunlah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan perencanaan pembangunan nasional disusun secara terpadu oleh Kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang terdiri dari RPJP untuk periode waktu 20 tahun, RPJM untuk periode waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan untuk periode waktu 1 tahun.
5. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

1.2 PENGERTIAN

RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Tahun 2005-2025 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud dan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi semua komponen di daerah, dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama untuk dijadikan acuan bagi semua komponen pelaku pembangunan di daerah supaya pola sikap dan tindakannya menjadi sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

1.4 LANDASAN

Landasan idiil dari RPJPD ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJPD Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, dan landasan hukum.
- Bab II Kondisi Umum Daerah, menguraikan tentang kondisi saat ini, tantangan, dan modal dasar.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, menguraikan tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Bab IV Sasaran, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan, menguraikan tentang sasaran, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Bab V Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial dasar dan sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, hukum dan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban, sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, dalam dinamika kehidupan dan globalisasi akan banyak pula tantangan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu amat diperlukan upaya mengatasi dan meningkatkan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

2.1.1 Sosial Dasar dan Sosial Budaya

- a. Pembangunan bidang sosial dasar dan sosial budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Bali mencapai 3.124.467 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 554 jiwa/km² sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk Bali sebanyak 3.383.572 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 608,76 jiwa /km². Dengan membandingkan jumlah penduduk Bali dari hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan jumlah penduduk data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Bali adalah 1,47% dalam satu tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi dijumpai di Kabupaten Badung yaitu 2,47% dan paling rendah di Kabupaten Karangasem yaitu 0,90% dalam satu tahun. Hal ini disebabkan karena migrasi masuk yang cukup tinggi ke Kabupaten Badung dan urbanisasi dari Kabupaten Karangasem. Bila dilihat piramida penduduk tahun 2000 (data SP 2000) terlihat bahwa penduduk Bali semakin tua dimana proporsi penduduk usia anak-anak semakin berkurang dan proporsi penduduk usia lanjut semakin meningkat. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Bali pada tahun 2005 adalah 43 yang artinya bahwa 100 orang penduduk umur produktif (15-64 tahun) menanggung 43 orang penduduk usia tidak produktif (umur 0-14 dan diatas 64 tahun). Angka ketergantungan paling tinggi berada di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 49 dan paling rendah di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar yaitu sebesar 40.

- b. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia semakin menjadi baik antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali dari 62,20 pada tahun 1999 menjadi 69,60 pada tahun 2005. Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli.
- c. Pembangunan di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang terus meningkat, hal ini tercermin dari status kesehatan masyarakat Bali yang relatif cukup baik terlihat dari meningkatnya beberapa perilaku pola hidup sehat masyarakat Bali, turunnya angka kesakitan masyarakat, turunnya Angka Kematian Bayi (AKB), turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Tahun 2000 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33,50 perseribu kelahiran hidup sedangkan tahun 2005 AKB sebesar 7,28 perseribu kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2003 sebesar 63 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2005 terjadi penurunan menjadi 58 per 100.000 kelahiran hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Bali pada tahun 2000 sebesar 68,60 tahun sedangkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 72,11 tahun. Menurunnya angka kematian dan meningkatnya angka harapan hidup disebabkan oleh menurunnya kejadian penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi dan perbaikan lingkungan termasuk air bersih, meningkatnya status gizi anak-anak umur di bawah lima tahun (balita), meningkatnya jarak kelahiran, dan meningkatnya jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan primer (posyandu, puskesmas, petugas kesehatan praktek swasta) maupun pelayanan kesehatan sekunder atau rujukan (rumah sakit). Meningkatnya status ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi yang amat besar terhadap menurunnya angka kesakitan dan kematian sejumlah penyakit. Bila dilihat per kabupaten, kesakitan dan kematian erat kaitannya dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi masing-masing kabupaten. AKI, AKB, penyakit tuberkulosis (TBC) dan kurang gizi lebih tinggi/banyak dijumpai pada kabupaten yang proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi yaitu: Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Bangli. Demam Berdarah Dengue (DBD) lebih banyak dijumpai di Kota Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar, HIV/AIDS amat dominan di Kota Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan dan Gianyar, sedangkan malaria masih banyak dijumpai di Kabupaten Jembrana. Bila dilihat dari sebaran atau rasio petugas kesehatan per 100.000 penduduk, terlihat bahwa sebarannya belum merata. Rasio dokter umum menurut kabupaten/kota bervariasi antara 0,89 sampai 17,96, dimana terendah di Kabupaten Jembrana dan tertinggi di Kota Denpasar. Rasio dokter spesialis antara 0,20 sampai 9,60 dimana angka terendah di Kabupaten Karangasem dan tertinggi di Kota Denpasar. Rasio dokter gigi bervariasi antara 0,29 sampai 1,75 dengan rasio terendah di Kabupaten Klungkung dan tertinggi di Kota Denpasar. Rasio tenaga bidan berkisar 2,70 sampai 13,39, terendah di Kabupaten Klungkung dan tertinggi di Kota Denpasar dan rasio tenaga perawat berkisar antara 4,48 dan 57,24 terendah di Kabupaten Jembrana dan tertinggi di Kota Denpasar.
- d. Taraf pendidikan penduduk Bali mengalami peningkatan yang diukur antara lain dari meningkatnya angka melek aksara, dan yang telah

menamatkan jenjang SMP/MTs ke atas untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, serta meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Angka melek huruf penduduk Bali pada tahun 2002 adalah 84,2% dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 86,2%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 85,96%. Persentase penduduk buta huruf menurut kabupaten/kota di Bali pada tahun 2006 berkisar 6,23%-27,94%, tertinggi di Kabupaten Karangasem, dan terendah di Kota Denpasar. Persentase penduduk buta huruf di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, dan Buleleng. Tingkat pemerataan pendidikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Bali selama tahun 2003-2007 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2003 APK SD di Bali mencapai 114,31%, namun mengalami penurunan di tahun berikutnya, dan akhirnya menjadi 113,61% pada tahun 2007. Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Bali juga mengalami fluktuasi: 98,11% pada tahun 2003, selanjutnya menurun pada tahun 2004 (94,89%), tahun 2005 (94,58%), tahun 2006 (95,21%), dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 99,69%. Sebaran APK SMP di Bali cenderung meningkat dari tahun 2003 (90,65%) dan pada tahun 2007 menjadi 99,65% (belum ada data per kabupaten/kota). Fenomena yang sama juga terjadi pada APM SMP di Bali yang cenderung meningkat dari 64,37% pada tahun 2003 terus meningkat menjadi 78,64% pada tahun 2007. Seperti halnya SMP di Bali, APK dan APM SMU/SMK di Bali juga mengalami peningkatan. APK SMU/SMK di Bali pada tahun 2003 yakni 66,33%, dan meningkat menjadi 69,12% pada tahun 2007 (belum ada data kab/kota).

- e. Sampai tahun 2005, dari jumlah guru SD, SMP, dan SMU/SMK se Bali adalah 44.837 orang. Dari jumlah tersebut 10.477 orang (23,37%) guru belum memenuhi kelayakan mengajar yang terdiri atas guru SD sebanyak 4.431 orang, guru SMP 4.405 orang, dan guru SMU/SMK sebanyak 1.641 orang (perlu data guru setiap kab/kota). Hal ini disebabkan antara lain adanya kesenjangan guru keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan (*miss-match*). Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik saat ini masih rendah. Data kualifikasi akademik untuk guru TK, SD, SMP, SMU/SMK sampai tahun 2005 menunjukkan bahwa sebanyak 25.824 orang guru (56,29%) belum memenuhi kualifikasi akademis. Oleh karena itu, diupayakan melaksanakan pendidikan penyetaraan setara D4/S1 dalam rangka memenuhi standar kualifikasi akademis. Sarana dan prasarana pendidikan di Bali saat ini masih kurang memadai. Kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan relatif cukup besar yaitu 47,93% untuk SD/MTs, dan 14,69% untuk SMP/MTs. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses belajar mengajar menjadi kurang kondusif sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Ratio antara jumlah murid terhadap jumlah guru akan dapat mencerminkan kelancaran proses belajar mengajar. Semakin kecil ratio jumlah murid terhadap jumlah guru maka akan semakin baik. Artinya, bila rasionya semakin kecil maka jumlah murid yang diasuh oleh seorang guru akan semakin kecil pula dan demikian pula sebaliknya. Ratio murid dengan guru di Provinsi Bali selama tahun 2003-2007 untuk tingkat SD berkisar antara 17,36 dan 18,04, artinya setiap 17 atau 18 anak didik diasuh oleh satu orang guru. Untuk SMP, ratio jumlah murid terhadap jumlah guru di Bali tahun 2003-2007 berkisar antara 12,21 dan 16,66. Ratio terendah terjadi pada tahun 2006, dan rasio yang paling besar terjadi pada tahun 2004 (perlu data rasio guru-murid per kab/kota). Untuk SMU rasio jumlah murid terhadap jumlah guru di Bali tahun 2003-2007 mengalami rasio yang paling besar (buruk) terjadi pada tahun 2003 yaitu 17,83 dan semakin menurun hingga mencapai 11,72 pada tahun 2007. Sementara itu, rasio jumlah murid terhadap jumlah guru SMK di Bali

mengalami rasio yang paling besar (buruk) terjadi pada tahun 2007 yaitu 12,72, dan rasio yang paling kecil terjadi pada tahun 2004 yaitu 9,25. Secara umum, rasio pendidikan baik SD, SMP, SMU, dan SMK di seluruh kabupaten/kota di Bali rasionya masih ideal yaitu di bawah 30.

- f. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan peningkatan tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, angka buta aksara perempuan sudah menurun dari tahun 2003-2005 (6,81; 5,90; 5,47). Ijazah tertinggi yang dicapai pada jenjang SMU meningkat dalam periode yang sama, akan tetapi pada tingkat SD dan SMP masih berfluktuasi. Angka partisipasi perempuan (APS) sedikit meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2005 (60,7 ke 60,8). APS perempuan masih tetap lebih kecil dibandingkan laki-laki. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan dari tahun 2000 sampai tahun 2005 meningkat dari 72,7 menjadi 74,4. Di bidang ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk perempuan meningkat dari tahun 2003–2005 (59,92; 61,43; 66,80) tetapi masih tetap terjadi kesenjangan gender. Di bidang ekonomi, politik, ekonomi, hukum dan pemerintahan, perempuan masih jauh ketinggalan di bandingkan laki-laki. Dalam beberapa tahun belakangan ini pelecehan seksual dan perdagangan orang perempuan dan anak (*trafficking*) cenderung meningkat yang mengindikasikan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- g. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut Agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen, dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multi etnik, multi agama dan sistem kepercayaan, serta multi kultur. Untuk mempertahankan kebudayaan tersebut upaya penggalan, pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya dilakukan melalui revitalisasi dan peningkatan kualitas antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Pesta Kesenian Bali yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 1979. Hal ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas kebudayaan daerah Bali. Di samping itu, warisan budaya Bali sangat banyak dan beragam serta memiliki ciri-ciri khas yang unik sebagai warisan budaya etnik, nasional dan dunia. Keberadaan lembaga adat yang didasarkan pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu antara lain desa *pakraman*, *banjar*, dan *subak* (termasuk *subak abian*) yang sampai dengan akhir tahun 2005 masing-masing berjumlah 1.433 desa *pakraman*, 3.625 *banjar*, dan 2.338 *subak/subak abian*.
- h. Di bidang kehidupan beragama, kesadaran masyarakat Bali untuk melaksanakan upacara keagamaan berkembang dengan baik. Demikian

pula, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemeluk agama di Bali untuk membangun hubungan sosial yang harmonis baik secara intern maupun antarumat beragama untuk menumbuhkan rasa aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat Hindu di Bali terhadap *tatwa* (filsafat) dan *susila* (etika) agama Hindu masih perlu ditingkatkan.

- i. TPAK yang merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja menunjukkan bahwa rata-rata selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2000-2006 adalah sebesar 71,85%. Penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dari rasio jumlah yang bekerja dengan angkatan kerja dalam periode 2000-2006 rata-rata sebesar 96,14% sehingga rata-rata pengangguran dalam periode tersebut sebanyak 3,86% pertahun. Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan kerja pada periode tahun 2000-2006 didominasi oleh sektor non pertanian dengan penyerapan rata-rata sebesar 66,58% per tahun, sedangkan penyerapan sektor pertanian rata-rata sebesar 33,42% per tahun.
- j. Pengangguran di kalangan generasi muda yang tidak memiliki keterampilan jumlahnya cukup tinggi. Selain itu, partisipasi pemuda dan sarjana dalam pembangunan belum optimal. Pada tahun 2000 jumlah angkatan kerja sebesar 1.912.129 orang dengan jumlah pencari kerja sebanyak 51.112 orang, sedangkan pada tahun 2006 jumlah pencari kerja meningkat menjadi 103.830 orang.
- k. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan patokan kecukupan kalori 2.100 kkal/hari diperoleh bahwa jumlah penduduk miskin di Bali, pada tahun 2003 sebanyak 246.100 orang (7,34%) dan tahun 2004 sebanyak 231.900 orang (6,85%). Selama periode 2002 – 2003, sedikit mengalami penurunan sebanyak 0,49%, yakni dari 246.100 orang (7,34%) pada tahun 2003 menjadi 231.900 orang (6,85%) pada tahun 2004. Pada tahun 2003, kabupaten yang persentase penduduk miskinnya tertinggi adalah Kabupaten Buleleng sebesar 10,18% dan terendah terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,77%. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebesar 10,13% dan di Kota Denpasar sebesar 2,95%. Dari hasil pendataan rumah tangga miskin oleh BPS (dengan mempergunakan 14 variabel) diperoleh bahwa data per 31 Mei 2006 jumlah rumah tangga miskin di Bali mencapai 147.044 rumah tangga atau 16,9% dengan rincian per kabupaten meliputi Kabupaten Jembrana 6.998 RTM, Tabanan 11.672 RTM, Bandung 5.201 RTM, Gianyar 7.629 RTM, Klungkung 8.460 RTM, Bangli 13.191 RTM, Karangasem 41.826 RTM, Buleleng 47.908 RTM, dan Denpasar 4.159 RTM. Bervariasinya jumlah dan persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di Bali disebabkan oleh karakteristik demografi dan potensi di masing-masing wilayah tersebut.

2.1.2 Ekonomi

- a. Perekonomian daerah Bali dari sisi makro pada 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan dari angka pertumbuhan 3,05% pada tahun 2000 menjadi 5,56% pada tahun 2005, namun peningkatan tersebut belum memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain struktur perekonomian daerah Bali masih rentan terhadap berbagai gejolak karena bertumpu pada sektor tersier terutama pariwisata yang memberikan

kontribusi sebesar 64,48% terhadap pembentukan PDRB daerah Bali, namun sektor tersebut sangat peka terhadap berbagai isu. Keterpurukan industri kepariwisataan Bali akhir-akhir ini juga berdampak langsung pada menurunnya aktivitas industri kecil dan rumah tangga, karena permintaan akan produk ekspor non migas dari sektor industri kecil dan rumah tangga menurun, demikian pula pada sektor pertanian mengalami kelesuan dalam pemasaran produknya. Hal ini disebabkan karena rendahnya permintaan baik lokal maupun ekspor, sehingga menurunnya pendapatan petani.

- b. Masih terjadi kesenjangan perkembangan ekonomi yakni kesenjangan pendapatan antarwilayah kabupaten/kota dan kesenjangan antarsektor. Pendapatan per kapita antarwilayah pada tahun 2005, Kabupaten Badung merupakan daerah yang memiliki pendapatan tertinggi yakni sebesar Rp 16.575.940,- sementara itu yang terendah adalah Kabupaten Karangasem yakni sebesar Rp 5.539.860,-. Demikian pula terjadi kesenjangan antarsektor dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Bali, di mana pada tahun 2005 sektor jasa hotel dan restoran (pariwisata) paling dominan yaitu sebesar 29,37%, bila dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri masing-masing sebesar 20,29% dan 8,69%. Laju pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya dipengaruhi oleh selain konsumsi rumah tangga, juga oleh dua faktor utama yaitu perkembangan investasi dan aktivitas ekspor.
- c. Kondisi produksi tanaman pangan di Bali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1996-2005) berfluktuasi yang dipengaruhi oleh fluktuasi areal tanam dan areal panen akibat adanya alih fungsi lahan pertanian, dan pengaruh iklim. Dalam kurun waktu tahun 2000-2005, rata-rata mengalami alih fungsi lahan sawah seluas 1.005 ha per tahun. Luas panen padi sawah pada tahun 2000 adalah 153.226 ha atau sekitar 187% dari luas sawah dengan rata-rata produksi per ha sebesar 5,5 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau produksi total sebesar 850.225 ton GKG. Sedangkan pada tahun 2005 produksi GKG sebesar 838.755 ton dengan produktivitas 5,6 ton/ha. Ketersediaan pangan sumber kalori berkisar antara 2.858 sampai dengan 3.101 kkal per kapita per hari. Ketersediaan kalori ini berada di atas anjuran nasional yaitu sebesar 2.000 kkal per kapita per hari. Walaupun demikian, ketersediaan kalori masih didominasi oleh beras, sehingga perlu dilakukan upaya diversifikasi pangan. Pendapatan petani Bali masih relatif rendah. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2005, rata-rata pendapatan rumah tangga petani dari sektor pertanian hanya 33% dari total pendapatannya atau sebesar Rp. 11.000 per hari. Hal ini disebabkan karena luas lahan rata-rata yang diusahakan oleh petani sangat sempit yaitu di bawah 0,5 ha.
- d. Sub sektor peternakan potensinya belum dapat dikembangkan secara optimal, karena masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik menyangkut teknologi, permodalan, kualitas SDM peternak, maupun akses pasar. Populasi sapi Bali pada tahun 2005 hanya sekitar 590.949 ekor. Dibandingkan populasi pada tahun 2000 sebesar 529.074 ekor telah terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,34% per tahun. Populasi ternak lain yang juga cukup menonjol adalah babi dan ayam. Pada tahun 2005 populasi ternak babi sebanyak 854.914 ekor, selama periode 2000-2005 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jenis unggas yang dikembangkan di Bali umumnya terdiri atas ayam buras, ayam petelur, dan ayam pedaging. Pada tahun 2005 populasinya masing-masing sebesar 4.664.657 ekor, 3.796.634 ekor, dan 5.363.066 ekor, dan perkembangan populasi unggas dalam periode 2000-2005 sangat berfluktuatif.

- e. Sub sektor perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan perekonomian Bali, karena sub sektor ini selain berperan dalam pembentukan PDRB, juga mempunyai fungsi hidrorologis bagi daerah Bali. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor daerah Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete. Pada tahun 2005 tercatat luas areal tanaman kelapa dalam dan hibrida masing-masing seluas 70.142 ha dan 357 ha. Dibandingkan tahun 2000 seluas 72.114 ha, maka luas areal kelapa dalam mengalami penurunan sebesar 3,94%, dan jenis hibrida mengalami penurunan sebesar 0,39%. Hal ini juga berdampak pada menurunnya jumlah produksi kelapa hibrida dari 359.823 ton menjadi 224.090 ton. Sementara itu, luas areal tanaman kopi arabika pada tahun 2005 mencapai 7.556 ha mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2000 seluas 9.460 ha. Luas areal tanaman kopi robusta juga mengalami penurunan sebesar 13,20%, yaitu dari 27.476 ha pada tahun 2000 menurun menjadi 23.850 ha pada tahun 2005, hal ini juga mengakibatkan penurunan produksi sebesar 28,63%.
- f. Sub sektor kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pertumbuhan baru dalam upaya meningkatkan perekonomian Bali di masa mendatang. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal, seimbang, dan merata berupa sumber daya hayati, non hayati, jasa lingkungan lainnya, serta mineral dan energi. Komoditas perikanan seperti tuna, rumput laut, dan udang memiliki peluang ekspor sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali. Produktivitas perikanan tahun 1996 mencapai 176.614,8 ton dengan nilai Rp.91.141.479.000 dan tahun 2005 meningkat menjadi 248.197,6 ton dengan nilai Rp.767.172.827.204. Data ini menunjukkan terjadi pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 4,50% per tahun dengan pertumbuhan nilai rata-rata sebesar 82,49% per tahun. Konsumsi ikan pada tahun 1996 adalah 14,81kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 20,25 kg/kapita/tahun pada tahun 2005 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,09% per tahun.
- g. Sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai pendukung pariwisata Bali mempunyai peluang ekspor yang cukup menjanjikan bagi perolehan devisa Bali di masa mendatang. Nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun 2005 mencapai Rp 2.915.529,846 juta atau meningkat 8,47% dibandingkan tahun 2000 yang mencapai Rp 2.047.898,00 juta, dengan kontributor terbesar adalah Kabupaten Gianyar yakni sebesar Rp 1.037.787,310 juta dan terendah adalah Kabupaten Buleleng yakni sebesar Rp 57.731,103 juta. Nilai produksi pada tahun 2005, meliputi sektor formal sebesar Rp 2.052.531,441 juta dan sektor informal sebesar Rp 862.998,405 juta.
- g. Sektor pariwisata, sebagai andalan utama ekonomi Bali sangat rentan dipengaruhi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, yang sifatnya baik lokal, regional, maupun global. Adanya berbagai peristiwa dan konflik pada beberapa daerah di Bali sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan Bali. Selama 20 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan ke Daerah Bali sangat berfluktuasi sebagai akibat berbagai insiden, baik lokal, regional, maupun global. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali per tahun selama kurun waktu 2000-2005 mencapai 1.386.448 orang dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2004 yakni sebanyak 1.457.565 orang dan

terendah terjadi pada tahun 2003 yakni sebanyak 993.185 orang. Lima besar negara asal wisatawan yang berkunjung langsung ke Bali selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2000-2005 adalah Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman. Rata-rata tingkat hunian kamar berdasarkan klasifikasi hotel per tahun selama lima tahun terakhir adalah 48,51%, di mana pada tahun 2005 untuk hotel bintang satu sebesar 39,68%, hotel bintang dua sebesar 38,08%, hotel bintang tiga sebesar 36,62%, hotel bintang empat sebesar 43,22%, dan hotel bintang lima sebesar 49,14%. Rata-rata lama menginap (*average length of stay*) pada tahun 2005 pada hotel berbintang mencapai 3,63 hari, meliputi wisatawan mancanegara 3,83 hari dan wisatawan nusantara 3,23 hari. Komposisi ini agak berbeda dibandingkan tahun 2002, di mana rata-rata lama menginap mencapai 4,07 hari, meliputi wisatawan mancanegara 4,20 hari dan wisatawan nusantara 3,62 hari.

- i. Penanaman modal di daerah Bali, realisasinya selama dua puluh tahun terakhir, terhitung sejak tahun 1986 s/d 2005 menunjukkan bahwa total investasi PMDN dan PMA adalah sebesar Rp 8.958.145.908.580,00 yang terdiri atas investasi PMDN sebesar Rp 3.915.114.998.963,00 (43,7%) dan investasi PMA sebesar Rp 5.043.030.911.617,00 (56,3%). Masih berfluktuasinya realisasi investasi PMDN dan PMA selama dua puluh tahun terakhir erat kaitannya dengan perekonomian Daerah Bali yang masih didominasi oleh faktor konsumtif dan bukan faktor investasi serta belum kondusifnya iklim investasi.
- j. Perkembangan ekspor daerah Bali selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2000-2005 rata-rata sebesar USD 621,992,417.96 di mana ekspor tertinggi pada tahun 2005 yakni sebesar USD 867,86,927.603.36 dan terendah pada tahun 2001 yakni sebesar USD 383,613,720.99. Sementara itu, andil ekspor Bali terhadap ekspor non-migas nasional rata-rata per tahun selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2000-2005 adalah 0,52%, di mana ekspor terbesar pada tahun 2000 sebesar 0,58% dan terendah pada tahun 2004 yakni sebesar 0,42%.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Belum terbangunnya masyarakat dengan budaya iptek menyebabkan penguasaan, pengembangan, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) belum optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Masih banyak potensi yang dimiliki Bali belum tergarap secara optimal akibat lemahnya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK. Selain itu lembaga-lembaga penelitian yang ada di perguruan tinggi dan tenaga-tenaga penelitiannya juga amat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kegiatan penelitian terapan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali periode tahun 2000-2004 mengalami peningkatan dari 290 buah menjadi 347 buah, tetapi jumlah penelitian sebagian besar merupakan penelitian bidang sosial budaya. Sebagai contoh data tahun 2004, dari 347 buah penelitian terapan, 224 buah merupakan penelitian bidang sosial budaya, 91 buah bidang ekonomi. Dari 91 buah penelitian terapan bidang ekonomi, hanya 32 buah merupakan penelitian pertanian dalam arti luas termasuk bidang iptek. Selain itu, peran pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan penelitian masih sangat kecil yaitu berkisar antara 39-83 buah dari tahun 2000-2004 (39 buah pada tahun 2004).

2.1.4 Politik, Hukum dan Pemerintahan

- a. Dalam bidang politik, masuknya berbagai kepentingan politik di daerah telah menyebabkan kerawanan Bali terhadap konflik, baik horizontal maupun vertikal. Semua ini pada akhirnya telah mengganggu stabilitas politik di daerah. Hal tersebut antara lain dapat diketahui baik dari adanya konflik antar individu maupun antar kelompok pada berbagai tempat di Bali yang dipicu oleh kepentingan politik. Kesadaran politik masyarakat telah meningkat dari sebelumnya, namun pemahaman masyarakat tentang “berpolitik yang sehat dan benar” masih sangat kurang, karena belum adanya pendidikan politik kearah tersebut. Wawasan gender dalam politik belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya, walaupun politik merupakan salah satu sektor yang dijadikan sasaran Pengarusutamaan Gender.
- b. Dalam bidang hukum, penegakan supremasi hukum dan HAK Azasi Manusia (HAM) ternyata sampai saat ini belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Bali dan bangsa Indonesia. Gagalnya penegakan supremasi hukum disebabkan oleh berbagai faktor meliputi substansi hukumnya, kualitas SDM penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat serta sarana dan prasarana.
- c. Dilihat dari segi produk dan substansi hukumnya baik tertulis (Peraturan Daerah) maupun yang tidak tertulis (hukum adat) ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan pembangunan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang begitu cepat setelah memasuki era globalisasi. Keadaan ini dapat dilihat dari masih banyaknya hal-hal penting dalam kehidupan masyarakat belum diatur oleh peraturan daerah, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan tertentu terkait dengan hal tersebut tidak dapat diproses secara hukum, atau kurang mendapat perlindungan hukum. Selain itu, sosialisasi terhadap berbagai produk hukum di daerah yang telah ada tampaknya belum menjangkau masyarakat luas, sehingga banyak warga masyarakat belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Lemahnya penegakan supremasi hukum, erat juga kaitannya dengan profesionalisme dan tanggungjawab yang rendah dari sebagian aparat penegak hukum termasuk didalamnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selama ini sorotan miring banyak ditujukan kepada para penegak hukum yang kinerjanya dianggap masih kurang mengayomi masyarakat.
- e. Budaya hukum masyarakat tidak kalah pentingnya sebagai faktor penghambat dalam penegakan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari sebagian warga masyarakat tercermin dari masih banyaknya pelanggaran hukum (perda) dalam berbagai aspek dan bentuknya. Kurangnya pengetahuan sebagian warga masyarakat tentang hukum dan prosedur hukum, serta masih adanya kebiasaan “menyuap” dari masyarakat sering pula menyulitkan para penegak hukum dalam upaya menegakan hukum sebagaimana mestinya.
- f. Dalam bidang pemerintahan, perubahan sistem pemerintahan ke sistem desentralisasi merupakan peristiwa penting bagi pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sistem desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang menekankan

bahwa otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, ternyata telah mengakibatkan egoisme dan arogansi pemerintah kabupaten/kota, maupun desa *pakraman* yang mengklaim dirinya sebagai pemegang otonomi asli, sehingga menghambat jalannya pembangunan Bali sebagai suatu kesatuan.

- g. Demokratisasi sebagai tuntutan sistem desentralisasi dan reformasi dalam sistem pemerintahan, di satu sisi memang telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak dan tanggungjawabnya, akan tetapi disisi lain, ternyata jalannya proses demokratisasi tersebut terkesan kebablasan, dan justru seringkali menimbulkan tindakan anarkis di masyarakat.
- h. Pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*) yang diharapkan masyarakat Bali dan bangsa Indonesia belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum birokrat maupun anggota legislatif.
- i. Sistem administrasi pemerintahan di daerah dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif dan efisien karena kurangnya disiplin, dan tanggungjawab serta profesionalisme sebagian aparat pemerintah.
- j. Fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah belum sepenuhnya berjalan secara obyektif dan efektif.

2.1.5 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

- a. Kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Gangguan yang terjadi karena tragedi Bom Bali Tahun 2002 dan Tahun 2005 hanya bersifat sementara. Intensitas dampak tragedi tersebut semakin berkurang dengan relatif cepatnya pengungkapan dan penanganan kasus tersebut, serta adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan Bali. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan.
- b. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram.
- c. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

2.1.6 Sarana Prasarana

- a. Kondisi sarana dan prasarana di daerah Bali saat ini masih ditandai oleh kurangnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Sehingga sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan keseimbangan pembangunan wilayah.

- b. Sebelum diperkenalkannya Rencana Pembangunan Lima Tahunan (repelita), masyarakat sudah melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara swadaya melalui organisasi subak. Sejak Repelita operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
- c. Dari 497 buah bendung PU pada tahun 2004, hanya 220 buah (44,26%) berfungsi baik, sisanya (55,74%) rusak ringan dan rusak berat. Demikian juga bendung non-PU, dari 829 buah pada tahun 2004 hanya 176 buah (21,23%) kondisinya baik, sisanya (78,77%) dalam kondisi rusak ringan dan berat.
- d. Bali memiliki jalan sepanjang 6.732 km, dengan status jalan nasional 501,64 km (7,45%), jalan provinsi 839,88 km (12,47%) dan jalan Kabupaten 5.391,44 km (80,08%). Kondisi jalan tahun 2004 yang tergolong baik adalah 45,47%, sedang 44,27%, rusak 8,97% dan rusak berat 1,29% menjadi kondisi baik 46,36%, sedang 44,11%, rusak 8,25% dan rusak berat 1,28% pada tahun 2005. Secara keseluruhan, jenis perkerasan permukaan jalan di Bali mencapai 5.774,46 km atau 85,76% sudah diaspal, sedangkan perkerasan dengan krikil dan tanah secara berturut-turut baru mencapai 231,54 km atau 3,44% dan 726,95 km atau 10,80%. Tingkat Pelayanan Jalan (TPJ) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada tahun 2005 ruas-ruas jalan di Bali Bagian Selatan lebih kritis daripada Bali bagian utara. Ruas-ruas jalan yang V/C rasionya lebih dari 0,60 atau telah mengalami kemacetan lalu lintas diantaranya ruas jalan Antosari-Tabanan (0,72), Kediri-Mengwitani (0,72), Mengwitani-Denpasar (0,76), Simpang Cokroaminoto-Simpang Tohpati (0,66), Sakah-Blahbatuh (0,74), Blahbatuh-Semebaung (0,60), Semebaung-Gianyar (0,85), Gianyar-Sidan (0,72), Sidan-Klungkung (0,67), Klungkung-Anggentelu (0,66), Denpasar-Pesanggaran (0,83) dan Denpasar-Tuban (0,86). Selain itu masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum hanya sekitar 5%. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan. Jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2001 sebanyak 930.911 unit dan pada tahun 2006 sebanyak 1.531.329 unit, ini berarti jumlah kendaraan bermotor 5 tahun terakhir rata-rata meningkat 12,43% pertahun. Komposisi kendaraan bermotor pada tahun 2005 dirinci menurut jenisnya adalah mobil penumpang 149.137 unit (9,74%), mobil barang 62.170 unit (4,06%), dan sepeda motor 1.319.740 unit (86,20%). Dari jumlah mobil penumpang tersebut sebanyak 11.187 unit merupakan angkutan umum penumpang yang terdiri dari angkutan kota antarprovinsi 535 unit, angkutan pariwisata 947 unit, angkutan sewa 4379 unit, dan taxi 2.152 unit.
- e. Sistem jaringan pelayanan transportasi keluar masuk Bali dapat dicapai melalui pelabuhan penyeberangan lalu lintas laut provinsi Bali di dukung oleh pelabuhan penumpang Benoa dengan kapasitas kapal penumpang 20.000 GT atau kapal barang 10.000 DWT, pelabuhan barang Celukan Bawang dengan kapasitas kapal barang 10.000 DWT, pelabuhan perikanan Pengambengan, pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang dengan kapasitas kapal 2.000 GT, pelabuhan penyeberangan Padangbai-Lembar dengan kapasitas kapal penumpang 2.000 GT, serta yang masih direncanakan adalah pelabuhan penyeberangan Amed, pelabuhan pariwisata Tanah Ampo dan pelabuhan penyeberangan Gunaksa. Jumlah penumpang yang memanfaatkan pelabuhan tersebut, untuk kedatangan mengalami peningkatan sebesar 10,25% yaitu 5.703.283 orang pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004 sejumlah 5.173.088

orang. Sementara itu, yang berangkat juga mengalami peningkatan sebesar 13,52%, yakni dari 5.246.510 orang di tahun 2004 menjadi 5.955.976 orang di tahun 2005. Lalulintas angkutan laut terpadat terjadi di pelabuhan Gilimanuk, yakni yang datang sebanyak 1.941.331 orang (34,04%) dan yang berangkat 1.826.436 orang (30,67%).

- f. Transportasi udara hingga tahun 2005 didukung oleh Bandar Udara (Bandara) Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Air Strip Kolonel Wisnu di Grokgak untuk pengembangan kawasan pertahanan keamanan (Hankam), dan *Helipad* di Nusa Penida untuk pengembangan wilayah Nusa Penida. Selama tahun 2005 melalui Bandara Internasional Ngurah Rai untuk penerbangan domestik dan internasional arus keberangkatan pesawat udara mencapai 31.441 kali penerbangan dan kedatangan sebanyak 31.315 kali penerbangan. Kapasitas dari landasan pacu (*runway*) pada tahun 2005 dapat menampung 40 pergerakan per jam, sedangkan saat ini volume jam puncaknya baru 20 pergerakan per jam atau baru setengah dari total kapasitas. Dilihat dari landasan pacu yang ada saat ini dibandingkan dengan kecenderungan jenis pesawat terbang yang membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang maka kondisi saat ini belum memadai. Pertumbuhan kedatangan penumpang selama sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat dengan rata-rata 6,18% per tahun, sedangkan penerbangan pesawat mengalami pertumbuhan sekitar 6,66% per tahun, dan pengiriman barang (*cargo*) mengalami pertumbuhan sekitar 10,20% per tahun.
- g. Pembangunan infrastruktur air minum sampai tahun 2005 cakupan pelayanan air minum untuk kawasan perkotaan sebesar 71,20% yang meliputi sistem perpipaan 70% dan non perpipaan 1,2%. Sedangkan untuk kawasan perdesaan cakupan pelayanan air minum sebesar 32,9% yang meliputi sistem perpipaan 14% dan non perpipaan 18,9%.
- h. Penanganan air limbah dilakukan secara komunal dan sistem perpipaan. Sampai tahun 2005 prasarana air limbah berupa: mandi kakus sebanyak 11.400 unit, mandi cuci sebanyak 585 unit, jamban keluarga 43.390 unit, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 20.210 unit dengan jumlah Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) sebanyak 7 unit tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota. Pengelolaan air limbah dengan sistem perpipaan melalui *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP) dengan wilayah pelayanan meliputi Denpasar, Sanur dan Kuta serta penanganan air limbah secara regional lainnya adalah IPAL Regional Ubud.
- i. Sampai dengan tahun 2005 volume sampah yang terkumpul melalui TPA yang ada diseluruh Bali tercatat sebanyak 5.068 m³/hari dengan TPA seluas 49 ha di dukung oleh prasarana pengangkutan/transportasi (*truck sampah, dum truck, arm roll truck dan compactor*) sebanyak 671 buah.
- j. Sampai tahun 2005 pembangunan drainase pada kawasan perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan (IKK) untuk jenis drainase berupa saluran utama/primer sepanjang 243.166 m, saluran sekunder sepanjang 167.249 m. Pembangunan drainase sebagai upaya untuk mengurangi potensi banjir khususnya pada kawasan perkotaan belum berfungsi secara baik. Hal ini disebabkan karena kapasitas tidak mencukupi dan juga dipergunakan untuk saluran air limbah. Selain itu sampai dengan saat ini *masterplan drainase* baru dimiliki oleh Kota Denpasar.

- k. Infrastruktur telematika di Provinsi Bali meliputi jaringan telepon, jaringan radio, jaringan televisi, jaringan internet, dan sebagainya.
- l. Penggunaan energi listrik di Bali sebagai daerah tujuan wisata utama dunia terus menunjukkan peningkatan cukup pesat. Kebutuhan energi listrik di Bali setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali. Pada pertengahan tahun 2005 kebutuhan energi listrik di Bali pada beban puncak mencapai 400,8 MW. Kebutuhan energi ini dipasok oleh PLTD/PLTG Pesanggaran yang memiliki daya mampu 152 MW, PLTG Gilimanuk 130 MW, dari jaringan interkoneksi Jawa-Bali melalui kabel laut dengan kapasitas 200 MW, dan PLTGU Pemaron sebesar 80 MW. Dengan demikian total pasokan energi listrik di Bali mencapai 562 MW.

2.1.7 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup

- a. Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.632,86 Km², yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km² ($\pm$ 24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 123,98 Km² ($\pm$ 2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti peraturan daerah tentang rencana tata ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Disamping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan.
- c. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi. Luasan wilayah di Bali yang memiliki lahan kritis dan sangat kritis pada tahun 2004 seluas 55.313 ha dengan tingkat erosinya tergolong sedang sampai berat, luasan wilayah di Bali yang memiliki tingkat erosi

tergolong sedang adalah 60.326,2 ha (10,7%), berat 68.204,3 ha (12,1%), dan sangat berat 99.252,6 ha (17,1%). Kerusakan lahan akan berlanjut apabila kondisi ini dibiarkan terus.

- d. Sumberdaya hutan, kondisinya ditunjukkan oleh keberadaan kawasan hutan di provinsi Bali secara keseluruhan mencapai luas 130.686,01 ha. Luas hutan tersebut terdiri dari luas hutan daratan 127.271,89 ha dan luas hutan perairan laut 3.451 ha atau 23,2% dari luas wilayah provinsi Bali (563.286,00 ha). Ini berarti persentase luas kawasan hutan di Bali dibawah standar yang seharusnya 30%. Kondisi vegetasi hutan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: hutan bervegetasi lebat/hutan alam yang masih bagus seluas 71.349,5 ha (56,06%), hutan yang bervegetasi belukar/semak seluas 32.518,7 ha (25,55%), sisanya hutan kritis/sangat rawan sampai kosong seluas 23.403,3 ha (18,39%). Kerusakan hutan di Bali umumnya disebabkan oleh perambahan, kebakaran, dan penggunaan kawasan untuk diluar kegiatan kehutanan. Kerusakan hutan yang berkepanjangan juga mengakibatkan terganggunya tata hidrologis sehingga dapat menimbulkan kekeringan, banjir/longsor, menurunnya flora-fauna hutan, serta sumber hutan sebagai sumber plasma nutfah lainnya dan memberikan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan agama pada skala lokal, regional, nasional, dan global yang semakin besar.
- e. Flora dan fauna, jenisnya sangat beraneka ragam kendati Bali merupakan pulau yang relatif kecil. Berbagai jenis flora dan fauna dijumpai dalam ekosistem hutan pada sebaran hutan cagar alam, hutan lindung, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya (mangrove), hutan wisata, dan hutan rakyat. Kawasan Cagar Alam Batukaru misalnya memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang relatif tinggi. Jenis flora yang dijumpai mencapai 182 jenis, dan yang termasuk hampir langka adalah cemara pandak (*Podocarpus imbricatus*) dan bahkan mengarah pada tegakan murni. Jenis fauna yang teridentifikasi mencapai 45 jenis antara lain yang endemik dan yang telah dilindungi yaitu Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) dan kijang (*Muntiacus muncak*).
- f. Ruang terbuka hijau, luasannya secara terus menerus mengalami penurunan terlihat dari menurunnya luas lahan sawah, sedangkan luas lahan untuk permukiman meningkat. Pengurangan luas lahan persawahan rata-rata 1005 ha per tahun. Penggunaan lahan untuk permukiman meningkat dari 6,3% (1992) menjadi 7,3% (1997) dan 9,2% pada tahun 2005. Pengurangan luasan ruang terbuka hijau akan meningkat apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan.
- g. Di bidang pesisir dan kelautan, secara umum kondisi pantai Bali berpasir hitam dan sebagian lainnya berpasir putih. Sumberdaya alam yang menonjol di pantai Bali adalah padang lamun, rumput laut, *mangrove*, dan terumbu karang. Ekosistem padang lamun di Bali sudah banyak terdegradasi sebagai akibat dari aktivitas masyarakat dan pembangunan. Kondisi terumbu karang di Bali sudah sangat tertekan. Terumbu karang dengan status buruk 20,8%; sedang 39,6%; baik 35,8%; dan sangat baik hanya 3,8%. Degradasi juga terjadi pada *mangrove* karena kegiatan penambahan, pembuangan plastik dan kaleng-kaleng. Panjang garis pantai wilayah Bali adalah 430,8 km. Pantai Bali mengalami erosi pada tahun 1987, 1997, 2003, dan 2004 berturut-turut adalah sepanjang 51,50 km, 64,65 km, 70,11 km, dan 89,29 km atau 20,73% dari total panjang pantai

Bali. Dari panjang pantai yang tererosi tersebut hingga tahun 2005, yang tertangani baru sepanjang 43,00 km.

- h. Di bidang sumberdaya alam tak terbarukan, potensi keseluruhan bahan galian golongan C tahun 2005 adalah 10.234.374.721 m³ tersebar di sembilan kabupaten/kota. Bahan galian tersebut antara lain pasir 502.692.244 m³, batu kali/batu andesit 31.150.632 m³, batu tabas/batu lava 300.000 m³, batu paras 603.004.250 m³, batu kapur/limestone 10.010.652.032 m³, batu apung 5.522.000 m³, dan tanah liat 81.053.563 m³. Dengan tingginya kebutuhan bahan galian seperti batu paras, sirtu, kerikil, dan sebagainya maka cadangan bahan galian akan cepat habis dalam waktu singkat.
- i. Sumberdaya air yang berasal dari air permukaan di Bali didukung oleh adanya 162 sungai dan bermuara ke laut. Hulu sungai-sungai tersebut terletak di kawasan Bali bagian tengah, sedangkan hilirnya sebagian mengalir kearah pantai utara dan sebagian ke arah pantai selatan wilayah Bali. DAS di Bali umumnya berbentuk memanjang sesuai dengan perkembangan DAS yang dikontrol oleh topografi vulkanis sehingga mempunyai tipe radial. Sebaliknya sungai-sungai tersebut pada waktu musim kemarau airnya kecil atau bahkan berupa sungai mati (*intermittent*). Di Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau yang berfungsi sebagai penyimpan air, namun permukaan air danau Buyan dan Beratan menyusut.
- j. Air bawah tanah, permukaannya cenderung menurun sebagai akibat pengambilan air secara berlebihan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Kondisi ini terutama terjadi di Bali Selatan di mana kepadatan penduduk sangat tinggi dan pertumbuhan pariwisata sangat pesat. Di Kota Denpasar pengambilan air bawah tanah berdasar data retribusi air tanah adalah sebesar 3.225.720 m³ per tahun. Bila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar telah mengalami defisit air bila semua kebutuhan airnya hanya memanfaatkan air bawah tanah. Bahaya intrusi air laut akan terjadi bila pengambilan air bawah tanah tidak mendapat perhatian yang baik.
- k. Pencemaran air menjadi permasalahan yang semakin penting pada saat ini. Secara umum, kualitas air danau di empat lokasi telah mengalami penurunan status cemar kualitas. Penelitian yang dilaksanakan Tim PPLH Lemlit Unud (2003) diperoleh bahwa pencemaran telah terjadi pada air Danau Beratan, yang ditunjukkan oleh kandungan BOD₅ (2,24 ppm) dan COD (10,75 ppm) yang telah melebihi baku mutu air kelas I. Pencemaran juga telah terjadi pada air Danau Buyan, yang ditunjukkan oleh kandungan BOD₅, COD, Nitrat, Fosfat, dan Cuprum, yang telah melampaui baku mutu air kelas II. Pencemaran air laut juga terjadi di beberapa lokasi pantai di Bali. Sungai-sungai di perkotaan banyak tercemar oleh limbah domestik.
- l. Pencemaran tanah juga cenderung meningkat yang disebabkan oleh kemajuan industrialisasi yang tidak diimbangi dengan penerapan teknologi bersih sehingga berdampak negatif terutama terhadap lingkungan perkotaan. Kondisi tanah tercemar oleh bahan kimia, baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

- m. Peningkatan jumlah sumber pencemar udara seperti kendaraan bermotor akan meningkatkan intensitas pencemaran udara. Peningkatan penggunaan sepeda motor saat ini meningkat tajam terutama karena tidak tersedianya angkutan umum massal, murah dan nyaman. Konsentrasi Gas-Gas Rumah Kaca (GRK) disinyalir mengalami peningkatan dan secara keseluruhan, bahan-bahan pencemar udara yang meliputi sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, timbal dan debu, konsentrasinya masih di bawah standar baku mutu udara ambien.

2.2 TANTANGAN

2.2.1 Sosial Dasar dan Sosial Budaya

- a. Dalam 20 tahun mendatang, tantangan dalam bidang kependudukan di Provinsi Bali adalah jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lain yang cukup menonjol dalam bidang kependudukan adalah masalah migrasi, baik migrasi dari luar Bali maupun migrasi dari desa ke kota dan migrasi ke Bali Selatan terutama Badung, Denpasar dan Gianyar. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk, terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumberdaya dan hasil pembangunan. Otonomi daerah dan pembangunan ekonomi wilayah akan berpengaruh terhadap arah dan pola mobilitas penduduk. Kepadatan dan migrasi penduduk yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan (air bersih, pencemaran lingkungan, banjir, dll) dan masalah-masalah sosial antara lain kriminalitas. Semakin meningkatnya proporsi penduduk yang berusia tua juga akan merupakan tantangan yang penting di masa depan yaitu akan semakin meningkatnya kebutuhan layanan bagi orang tua dan berubahnya pola pelayanan dan jenis penyakit yang terjadi. Tantangan lain dalam bidang kependudukan adalah belum tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.
- b. Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah. Hal ini disebabkan faktor kesehatan, pendidikan, dan tingkat penghasilan yang masih rendah.
- c. Dalam pembangunan kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi, anak dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan; dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan, serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Diprediksi dalam 20 tahun ke depan yang akan dihadapi dalam bidang kesehatan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya TBC, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya, sementara itu telah dan akan muncul penyakit-penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS, rabies, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit-penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat. Masalah lain yang

juga akan terus meningkat adalah kesakitan dan kematian sebagai akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tantangan besar lainnya adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan ini akan terus meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit menahun (khronis) akan semakin dominan yang memerlukan masa perawatan panjang dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan semakin meningkat.

- d. Taraf pendidikan penduduk Bali yang diukur antara lain dengan angka melek aksara, dan yang telah menamatkan jenjang SMP/MTs ke atas untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, serta meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia perlu mendapat perhatian. Angka melek huruf penduduk Bali masih rendah terutama di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, dan Buleleng perlu ditingkatkan sehingga pada tahun 2025 tidak ada lagi penduduk Bali yang buta aksara. Tingkat pemerataan pendidikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMU/SMK di Bali pada tahun 2025 meningkat dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan.
- e. Pada saat ini guru-guru SD, SMP, dan SMU/SMK se Bali banyak yang belum memenuhi kelayakan mengajar yang terdiri atas guru SD sebanyak 4.431 orang, guru SMP 4.405 orang, dan guru SMU/SMK sebanyak 1.641 orang (perlu data guru setiap kab/kota). Hal ini disebabkan antara lain adanya kesenjangan guru keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan (*miss-match*). Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik saat ini masih rendah. Data kualifikasi akademik untuk guru TK, SD, SMP, SMU/SMK juga masih rendah. Oleh karena itu, diupayakan melaksanakan pendidikan penyetaraan setara D4/S1 dalam rangka memenuhi standar kualifikasi akademis. Sarana dan prasarana pendidikan di Bali saat ini masih kurang memadai. Kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan relatif cukup besar yaitu 47,93% untuk SD/MTs, dan 14,69% untuk SMP/MTS. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses belajar mengajar menjadi kurang kondusif sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Ratio antara jumlah murid terhadap jumlah guru saat ini masih mengalami fluktuasi, meskipun secara umum, rasio pendidikan baik SD, SMP, SMU, dan SMK di seluruh kabupaten/kota di Bali rasionya masih ideal yaitu di bawah 30.
- f. Rendahnya kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing tenaga kerja. Secara umum kualitas dan daya saing tenaga kerja di Bali masih rendah, antara lain ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja. Kualitas pendidikan formal maupun non-formal masih rendah dan jumlah sekolah kejuruan dan ketrampilan masih kurang. Partisipasi sekolah bagi penduduk Bali usia 19-24 tahun di Perguruan Tinggi juga masih rendah. Implikasinya adalah bahwa tenaga kerja masyarakat Bali memiliki daya saing yang rendah karena rata-rata jenjang pendidikannya juga rendah yakni tamatan di bawah SMP. Tantangan lainnya adalah rendahnya mutu pendidikan dan guru kurang termotivasi untuk mengajar sebagai akibat dari rendahnya pendapatan dan kesejahteraan mereka. Selain tingkat pendidikan, daya saing penduduk Bali antara lain disebabkan juga karena kurangnya jiwa kewirausahaan (*interpreneurship*) masyarakat Bali. Rendahnya daya saing dan rendahnya jiwa kewirausahaan penduduk Bali merupakan salah satu faktor yang

mengakibatkan meningkatnya arus migrasi masuk dan meningkatnya penjualan lahan-lahan pertanian kepada pengusaha luar Bali. Bila masalah ini tidak dicari jalan keluarnya maka dalam 20 tahun ke depan ungkapan bahwa penduduk Bali hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri akan semakin menjadi kenyataan. Tantangan yang muncul adalah pengangguran di kalangan generasi muda cenderung semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah pencari kerja.

- g. Dalam 20 tahun ke depan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan gender adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, tantangan yang lain adalah belum terbentuknya kesadaran gender dalam setiap lapisan masyarakat. Demikian juga terhadap perlindungan hukum anak, belum ada kepedulian yang memadai baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas.
- h. Dalam 20 tahun mendatang di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan utama adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan bantuan teknologinya yang serba canggih terutama di bidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jatidiri orang Bali, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing untuk pencapaian nilai-nilai universal.
- i. Di bidang kehidupan beragama, timbulnya banyak aliran-aliran keagamaan/kepercayaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan beragama, baik antarumat maupun interen umat, sehingga tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama. Di samping itu, upaya untuk membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum optimal di masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun belum dilakukan dengan baik, demikian pula, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang sering muncul adalah sifat fanatisme sempit, berperilaku amoral, dan anarki di masyarakat.
- j. Berkaitan dengan kemiskinan, tantangan dalam 20 tahun ke depan adalah lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses penduduk miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap program pengentasan kemiskinan.

2.2.2 Ekonomi

- a. Tantangan pertumbuhan ekonomi Bali dalam 20 tahun ke depan, sangat rentan terhadap berbagai gejolak, baik internal maupun eksternal, antara lain menyangkut aspek politik dan keamanan, kebijakan ekonomi nasional, dan isu tersebarnya wabah penyakit. Pertumbuhan rata-rata per tahun khususnya tentang kesempatan kerja pada periode 2005-2025 diharapkan terus meningkat diatas rata-rata pertumbuhan pencari kerja, sehingga

angka pengangguran secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Lapangan usaha yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih besar dalam periode ini, adalah di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.

- b. Dalam 20 tahun ke depan, tantangan utama dalam bidang ekonomi adalah kesenjangan perkembangan ekonomi khususnya ketidakseimbangan produktivitas antarsektor perekonomian yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Kontribusi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier saat ini masing-masing mencapai angka 20,95%, 14,57%, dan 64,48%. Struktur perekonomian tersebut sangat rentan terhadap berbagai gejolak. Keterpurukan industri kepariwisataan Bali akhir-akhir ini, juga berdampak langsung pada menurunnya aktivitas industri kecil dan rumah tangga, karena permintaan akan produk ekspor non migas dari sektor industri kecil dan rumah tangga menurun, demikian pula pada sektor pertanian mengalami kelesuan dalam pemasaran produknya, hal ini disebabkan rendahnya permintaan baik lokal maupun ekspor, sehingga menurunnya pendapatan petani.
- c. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan pertanian adalah berkurangnya luas lahan pertanian yang diikuti luas garapan rata-rata petani semakin menjadi sempit yakni sekitar 0,38 ha per petani, rendahnya tingkat pendidikan petani (lebih dari 80% petani hanya tamat SD atau tidak tamat SD), penguasaan dan akses teknologi masih sangat lemah, penguasaan informasi dan akses pasar masih lemah, harga hasil pertanian berfluktuasi sangat besar dan secara relatif masih sangat rendah, dan akses terhadap permodalan sangat terbatas, akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan keluarga petani. Tantangan lainnya yang berkaitan dengan pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas di satu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan di sisi lain, karena menurunnya fungsi hidrologis dan terjadi persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian.
- d. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan sub sektor peternakan adalah dalam hal pengembangan teknologi budidaya ternak besar seperti sapi, babi, dan kambing serta unggas seperti ayam buras, ayam petelur, dan ayam pedaging dalam rangka untuk mengoptimalkan semua potensi peternakan dalam rangka meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak.
- e. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan sub sektor perkebunan adalah dalam hal pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan untuk semua produk unggulan seperti kelapa dalam dan hibrida, kopi arabika dan robusta, cengkeh, vanili, dan jambu mete serta keberpihakan pemerintah yang memungkinkan petani kebun meningkatkan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
- f. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan sub sektor kelautan dan perikanan adalah pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

- g. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan sektor industri adalah pengembangan industri berbasis teknologi moderen tepat guna sesuai potensi lokal agar selalu dapat menciptakan produk bermutu tinggi, berkeunggulan, dan berdaya saing global sebagai pendukung pariwisata.
- h. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah persaingan di era global yang semakin ketat dalam hal *attraction*, *accessibility*, *ancillary*, dan *amenities* sebagai daya tarik utama wisatawan akan berpengaruh terhadap Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan konsep pengembangan pariwisata budaya. Oleh karena itu, ke depan pengembangan pariwisata harus tetap mempertahankan kearifan lokal yang berbasis pada budaya masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan antara pemanfaatan ruang dan teknologi dengan kelestarian lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Sehubungan dengan itu, tantangannya adalah semakin sulitnya menghadapi masalah internal dan eksternal seperti rendahnya penguasaan teknologi informasi dan kesiapan menghadapi era perdagangan bebas. Pengembangan pariwisata ke depan perlu tetap mempertahankan kearifan lokal, serta keharmonisan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta pemberdayaan masyarakat lokal.
- i. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan penanaman modal adalah menjadikannya semakin kondusif sistem perijinan dan kepastian hukum dalam memacu pertumbuhan investasi PMDN dan PMA.
- j. Tantangan 20 tahun ke depan yang berkaitan dengan ekspor adalah pengembangan akses pasar ekspor produk unggulan Daerah Bali ke berbagai negara yang berpotensi terutama yang tidak memiliki hambatan masuk.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Dalam era global, persaingan yang terjadi akan semakin ketat yang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung berbagai bidang kehidupan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Prediksi 20 tahun kedepan adalah kontribusi dan pemanfaatan iptek dalam berbagai bidang kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Bali.
- b. Sangat terbatasnya temuan-temuan baru yang dihasilkan, oleh lembaga pendidikan maupun penelitian. Berkaitan dengan teknologi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dan diterapkan pada bidang industri, seni budaya dan maupun pertanian masih sangat terbatas, dan masih rendahnya komitmen berbagai pihak dalam pengembangan IPTEK.
- c. Belum adanya lembaga atau institusi yang mumpuni serta terbatasnya infrastruktur dan SDM peneliti, yang mampu secara optimal mengkoordinasikan kegiatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK daerah Bali. Saat ini, ada beberapa institusi penelitian terkait dengan pengembangan pertanian yang semuanya merupakan institusi pusat (bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Departemen Pertanian RI). Karena balai penelitian ini merupakan institusi pusat, maka kewenangan dan cakupan kegiatannya disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan institusi induknya. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur cakupan dan jenis kegiatan Balai Penelitian tersebut, sehingga hasil kajiannya belum sepenuhnya sejalan dengan perencanaan pembangunan Daerah Bali.

2.2.4 Politik, Hukum dan Pemerintahan

- a. Belum mantapnya pemahaman etika politik dari elit politik di daerah, sehingga dikhawatirkan akan terjadi persaingan tidak sehat dalam memperebutkan kekuasaan.
- b. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum (perda) maupun hukum adat yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, karena lemahnya penegakan hukum (perda) maupun penegakan hukum adat. Selain itu, masih adanya kekosongan hukum karena ada hal-hal penting yang menyangkut kepentingan orang banyak belum diatur dalam peraturan daerah. Hal seperti itu terjadi karena perkembangan hukum selalu ketinggalan dalam mengikuti perkembangan zaman.
- c. Masih adanya kecendrungan sebagian aparat pemerintah dan juga masyarakat yang belum memahami dan menghayati dengan baik penjabaran dan makna otonomi daerah sehingga dalam pelaksanaannya cenderung menimbulkan kesulitan dalam berkoordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota. Hal ini mengkhawatirkan keutuhan Bali sebagai suatu kesatuan pemerintahan.

2.2.5 Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban

- a. Tantangan 20 tahun ke depan yang dihadapi untuk mewujudkan keamanan di Bali adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM petugas keamanan yang mampu menanggulangi tindakan-tindakan kriminal, isu teror, dan berbagai model kejahatan melalui peralatan elektronik yang cenderung meningkat di masyarakat.
- b. Dalam mewujudkan rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat, tantangan berat yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk yang semakin meningkat dengan kepentingan yang potensial untuk menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam pergaulan hidup di masyarakat.
- c. Tantangan kedepan terkait dengan bidang ketertiban, adalah pengawasan/kontrol petugas dan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran dan perilaku menyimpang masih relatif lemah.

2.2.6 Sarana Prasarana

- a. Tantangan pembangunan irigasi 20 tahun kedepan untuk mencapai intensitas panen padi lebih dari 200% dari areal sawah seluas 75.619 ha adalah penting mengingat biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP). Jaringan irigasi saat ini belum optimal masih banyak dijumpai jaringan irigasi yang rusak sebagai akibat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah memelihara jaringan, sehingga alokasi anggaran untuk irigasi yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber lainnya perlu disesuaikan kondisi saluran dapat berfungsi baik.

- b. Tantangan dibidang sumber air baku adalah keterbatasan sumber dan volume, baik air permukaan maupun air tanah, karena terganggunya beberapa komponen dalam siklus hidrologi seperti penyusutan luas hutan, alih fungsi lahan serta belum dilakukan penanganan *chachment area* dengan baik melalui konservasi. Selain itu, disebabkan pula oleh penggunaan air untuk kebutuhan non-pertanian yang semakin meningkat.
- c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan adalah membangun sistem penyediaan air minum melalui kerjasama antardaerah, mengingat sebaran dan kebutuhan air minum tidak merata di masing-masing kabupaten/kota, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas pelayanan, bersinergi dan saling menguntungkan.
- d. Tantangan transportasi darat adalah kondisi perkerasan jalan yang rusak pada sebagian ruas-ruas jalan di semua kabupaten/kota. Terbatasnya dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berimplikasi terhadap kondisi jaringan jalan yang ada. Tantangan lain dalam bidang transportasi darat adalah rendahnya penggunaan sarana angkutan umum yang disebabkan oleh terbatasnya akses ke semua tempat tujuan, kurang tepatnya waktu pemberangkatan dan tiba, serta biaya per satuan jarak yang relatif mahal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, permintaan pelayanan barang dan jasa keluar masuk Bali terus meningkat setiap tahun. Pelayanan tersebut sebagian besar melalui Bali Selatan sehingga ruas jalan Bali Selatan sebagian besar telah mencapai v/c rasio lebih dari 0,6. Hal tersebut akan memberikan beban berat bagi infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi diwilayah Bali Selatan.
- e. Tantangan 20 tahun ke depan untuk transportasi laut adalah penataan fungsi dan peningkatan fasilitas pelabuhan.
- f. Tantangan 20 tahun ke depan untuk transportasi udara adalah pengembangan bandar udara yang dilengkapi fasilitas penunjang untuk dapat melayani peningkatan jumlah penumpang.
- g. Tantangan penanganan air limbah 20 tahun kedepan adalah sistem penanganan secara terpusat pada kawasan tertentu dengan jumlah penduduk padat serta kegiatan ekonomi tinggi melalui sistem perpipaan. Tantangan lainnya adalah kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah masih rendah.
- h. Tantangan pengelolaan persampahan 20 tahun kedepan di Provinsi Bali adalah meningkatnya volume sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Penanganan sampah sangat terkait dengan keterbatasan lahan untuk penampungan TPA, serta sulit mencari lokasi untuk TPA yang representatif yang tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Tantangan lainnya adalah pengelolaan sampah sering dilakukan secara parsial, belum terlaksananya system pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan baik dan masih sedikit masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah mandiri.
- i. Pembangunan drainase pada 20 tahun kedepan dihadapkan pada tantangan belum terwujudnya masterplan drainase secara holistik antara

satu kawasan dengan kawasan lainnya, masih rendahnya pengetahuan kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap fungsi drainase yang sebenarnya. Tantangan lainnya adalah masih sedikitnya jumlah sumur-sumur resapan yang berfungsi untuk mengurangi potensi banjir.

- j. Infrastruktur telematika, beberapa tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan antara lain masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika.
- k. Tantangan di bidang energi adalah tingginya tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik 20 tahun kedepan yang berkisar antara 6 hingga 9 persen tiap tahun, antara lain untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang semakin meningkat. Tantangan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan listrik yang masih tergantung dari sistem jaringan Jawa-Bali.

2.2.7 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup

- a. Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjadi konsistensi pelaksanaan antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagian a) arahan lokasi kegiatan, b) batasan kemampuan lahan termasuk daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung oleh pengaturan berupa regulasi tata ruang yang searah, dan saling mendukung antar sektor dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan.
- b. Tantangan dalam pengembangan wilayah 20 tahun kedepan adalah pada keseimbangan pembangunan antar wilayah, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan kawasan-kawasan strategis baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Tantangan 20 tahun ke depan dalam pengelolaan lahan adalah tutupan vegetasi yang jarang dan tidak sesuai karakteristik topografi serta budidaya pertanian tanaman pangan yang intensif pada kawasan konservasi dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi.
- d. Tantangan dalam 20 tahun kedepan terhadap ruang terbuka hijau adalah menurunnya luas lahan sawah, hutan, dan tegalan/kebun yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.
- e. Tantangan pengelolaan sumberdaya alam 20 tahun kedepan adalah pemanfaatan yang belum berbasis pada pembangunan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Bali. Tantangan pengelolaan sumberdaya alam lainnya adalah mempertahankan kelestarian dan eksistensi biodiversitas Bali sebagai sumber plasma nutfah Bali.
- f. Kerusakan hutan di Bali umumnya disebabkan oleh perambahan, penjarahan, kebakaran, dan alih fungsi lahan hutan akibat penggunaan

hutan diluar kegiatan kehutanan. Kerusakan hutan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kekeringan, banjir/longsor, menurunnya flora-fauna hutan, dan memberikan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan agama pada skala lokal, regional, nasional, dan global yang semakin besar. Oleh karenanya yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan hutan adalah merubah paradigma berpikir masyarakat untuk membatasi aktivitas perambahan, penjarahan, kebakaran, dan alih fungsi lahan hutan. Demikian pula halnya akan keberadaan biodiversitas akan terus mengalami tekanan apabila tidak ada langkah-langkah konservasi dan penetapan maskot flora-fauna langka di masing-masing kabupaten di Bali. Peluang untuk pengembangan biodiversitas di Bali sangat besar terutama bila dikaitkan dengan pengembangan dunia iptek dan munculnya paradigma masyarakat untuk “kembali ke alam”. Tantangan yang ada dalam upaya konservasi dan pengembangan keanekaragaman hayati adalah masih minimnya data dan peta sebaran kondisi sumberdaya hayati.

- g. Pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, dan jasa kelautan, serta mencegah dan mengendalikan degradasi pesisir merupakan tantangan yang harus dihadapi pada masa 20 tahun mendatang.
- h. Tantangan yang dijumpai dalam pemanfaatan bahan tambang galian C sebagai sumberdaya alam tak terbarukan adalah meningkatnya kerusakan bentang alam dan diperlukan berbagai alternatif atau sumber bahan substitusi terbarukan yang ramah lingkungan.
- i. Pengelolaan sumberdaya air dalam 20 tahun mendatang akan mendapat tantangan terutama pada upaya memperbaiki kapasitas daerah tangkapan air, melestarikan sumber-sumber air termasuk perlindungan mata air dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah.
- j. Tantangan dalam hal pencemaran media lingkungan adalah meningkatnya akumulasi cemaran pada media air, tanah, dan udara karena masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
- k. Menghadapi perubahan iklim, tantangan ke depan adalah meningkatnya akumulasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang teremisikan ke atmosfer dan masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025

RPJPD diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta RPJPN sebagaimana ditetapkan dengan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang serta dengan memperhitungkan potensi daerah dan faktor-faktor strategis daerah Bali, demikian juga amanat pembangunan sebagai yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 adalah:

“ Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana* ”

Yang berarti Jayalah Pulau Bali berlandaskan nilai-nilai, norma, tradisi dan kearifan lokal *Tri Hita Karana* mengarah pada pencapaian terwujudnya Provinsi Bali dan masyarakat Bali yang lebih sejahtera lahir dan batin dengan pelaksanaan pembangunan yang mampu mengatasi dan mengurangi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki yang dilandasi oleh nilai-nilai, norma, tradisi dan kearifan lokal yang bersumber pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai sebagai tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Aspek *parhyangan* mempunyai makna keterikatan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religius. Aspek *pawongan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di dalam keluarga, warga, desa pakraman, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sebagai wadah interaksinya. Aspek *palemahan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan.

3.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 - 2025

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagai berikut.

- 3.2.1 Mewujudkan masyarakat Bali yang unggul dengan mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penguasaan iptek.
- 3.2.2 Melestarikan kebudayaan daerah Bali dengan memperkuat jati diri dan adat istiadat masyarakat Bali melalui pemberdayaan kelembagaan, pemantapan aktivitas seni budaya dan penerapan nilai-nilai agama yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan tuntutan jaman.
- 3.2.3 Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat Bali yang berkeadilan serta demokratis dengan memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, kesetaraan gender, budaya hukum, politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3.2.4 Mewujudkan masyarakat Bali sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3.2.5 Mewujudkan pembangunan Bali yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan untuk menghadapi bencana alam.

BAB IV

SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Provinsi Bali yang lebih sejahtera dilandasi oleh nilai-nilai, norma, tradisi dan kearifan lokal bersumber pada Budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Bali Dwipa Jaya berlandaskan *Tri Hita Karana* dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dengan arah, tahapan dan prioritas pembangunan sebagai berikut :

4.1 SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Terwujudnya Masyarakat Bali yang Unggul

1. Terwujudnya masyarakat Bali yang berakhlak mulia, bermoral dan berdaya saing.
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,1 menjadi 75,0.
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,42 tahun menjadi 12 tahun (setara SMA/SMK).
4. Menurunkan pertumbuhan penduduk dari 1,47% menjadi 0,9%.
5. Meningkatnya rata-rata usia harapan hidup dari 70,5 menjadi 75,0 tahun.
6. Meningkatnya masyarakat Bali dalam penguasaan iptek, yang ditandai dengan meningkatnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

4.1.2 Lestarinya Kebudayaan Daerah Bali

1. Meningkatnya jati diri dan adat istiadat masyarakat Bali.
2. Meningkatnya penerapan nilai-nilai Agama Hindu dalam prilaku dan kehidupan masyarakat Bali.
3. Meningkatnya peranan lembaga kebudayaan Bali.
4. Meningkatnya aktivitas seni dan budaya Bali.

4.1.3 Terwujudnya Keamanan Daerah dan Masyarakat Bali yang Berkeadilan serta Demokratis

1. Menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial.
2. Meningkatnya rasa aman masyarakat Bali.
3. Meningkatnya peranan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya politik masyarakat Bali.

6. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4.1.4 Terwujudnya Masyarakat Bali yang Sejahtera

1. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa mencapai 8,2-9,4% dan PDRB perkapita sebesar US\$ 4.500, dengan asumsi situasi sosial-politik dan ekonomi internal dan eksternal cukup stabil, penduduk tahun 2025 sebanyak 4,03 juta, kontribusi pariwisata mencapai 50% dari total PDRB, kontribusi pertanian mencapai 15%-20%, total ekspor barang dan jasa mencapai 40-50%, investasi mencapai 20-25%.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang lebih kokoh dengan bertumpu pada kontribusi sektor primer sebesar 20%, sektor skunder sebesar 25% dan sektor tersier sebesar 55%.
3. Berkurangnya penduduk miskin (berdasarkan kecukupan kalori 2.100 kkal per hari) dari 6,2% menjadi 4,2%.
4. Terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha menjadi 97% dan angka pengangguran dapat diturunkan dari 3,3% menjadi 1,9%.

4.1.5 Terwujudnya Pembangunan Bali yang Lestari, Handal dan Merata

1. Lestarinya ekosistem perairan laut serta berkurangnya lahan kritis, abrasi pantai, dan pencemaran lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan DAS dari 23% menjadi sekurang-kurangnya 30%.
3. Lestarinya ruang terbuka hijau perkotaan sekurang-kurangnya 30%.
4. Terwujudnya pembangunan konservasi DAS dan prasarana Sumber Daya Alam (SDA), prasarana sumber daya air untuk menunjang kebutuhan air baku pada tahun 2025 sebesar 9.258 liter/detik, transportasi, sarana prasarana air minum, air limbah, persampahan, energi, dan telematika yang handal.
5. Terwujudnya infrastruktur untuk deteksi dini bencana (tsunami, serta bencana alam lainnya), dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana.
6. Terwujudnya pembangunan yang merata antar wilayah, antarsektor, dan antar berbagai lapisan masyarakat.
7. Terwujudnya tata guna lahan sesuai rencana tata ruang.
8. Membaiknya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas), serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana* menuntut kemampuan ekonomi untuk tumbuh cukup tinggi secara berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing

tinggi yang didukung oleh penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pada sektor jasa di dalam mengembangkan sumberdaya pembangunan. Berdasarkan sasaran pokok pembangunan dalam 20 tahun mendatang, maka pembangunan diarahkan pada pencapaian hal-hal sebagai berikut.

4.2.1 Mewujudkan Masyarakat Bali yang Unggul

- a. Pembangunan dalam bidang SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, persaingan dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama untuk terwujudnya SDM Bali yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.
- b. Pembangunan dalam bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin, melalui peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan prasekolah, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan belajar dan perbaikan tingkat keniraksaraan orang dewasa, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia. Pendidikan sepanjang hayat didorong sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Bali, terutama penduduk usia dewasa. Disamping itu, pengelolaan pendidikan dimantapkan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, serta untuk mengantisipasi persaingan dengan institusi pendidikan luar negeri yang akan semakin banyak di masa depan.
- c. Pembangunan dalam bidang pendidikan juga diarahkan pada relevansi pendidikan dan kompetensi melalui pendidikan dan latihan (diklat) yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, penyediaan sarana pendidikan yang bermutu; peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, juga diarahkan pada pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat yang cerdas dan maju.

- d. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka panjang diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek daerah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah Bali, baik secara domestik, nasional, maupun global melalui peningkatan kualitas IPTEK, peningkatan kualitas SDM IPTEK, serta reformasi kelembagaan penelitian dan pengembangan. Peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumberdaya dan fungsi lingkungan hidup.
- e. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, teknologi kesehatan, dan seni budaya serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM, IPTEK, peningkatan anggaran penelitian, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan industri baru berbasis produk litbang.
- f. Pembangunan dalam bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas terutama bagi penduduk miskin; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antarkabupaten dan antarkelompok penduduk; peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; peningkatan produksi, distribusi, serta pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan baik pencegahan primer, sekunder, maupun tersier pada penyakit-penyakit yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Bali melalui perbaikan perilaku sehat masyarakat; peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa; pengembangan tenaga kesehatan sehubungan dengan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan; peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu, serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat, melalui pembinaan dan pemasyarakatan olah raga menuju pembentukan budaya olah raga; peningkatan pembiayaan kesehatan melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai dan pengembangan asuransi kesehatan (sosial dan swasta).
- g. Pembangunan dalam bidang kependudukan diarahkan pada penataan persebaran dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota serta antara desa dan kota secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan, melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, serta pembukaan kawasan-kawasan industri terpadu (terutama bidang pertanian dan kerajinan) yang akan lebih banyak menampung tenaga kerja. Selain itu, daya saing penduduk Bali dan kerja sama antar provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional harus ditingkatkan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sebagai akibat meningkatnya migrasi masuk. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk juga diarahkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan Keluarga Berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

- h. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga, serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan yang didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan, peningkatan akses dan partisipasi, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender.
- i. Pembangunan kesejahteraan sosial juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Selain itu, sistem jaminan sosial dikembangkan bagi seluruh rakyat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diupayakan tidak merusak budaya tolong menolong yang telah berakar di masyarakat.
- j. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan, pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, serta memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh industri.
- k. Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global.
- l. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan SDM, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, kerangka peraturan untuk mendorong pengelolaan pembangunan SDM yang menerapkan *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya, serta dengan menerapkan sistem pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan.
- m. Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pengaturan hukum, serta administrasi pembangunan SDM secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai kualitas sumberdaya manusia yang setinggi-tingginya. Disamping itu, penataan

administrasi kependudukan perlu dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.

4.2.2 Melestarikan Kebudayaan Daerah Bali

- a. Pemantapan jati diri orang Bali diarahkan kepada terwujudnya karakter orang Bali yang tangguh, bermoral tinggi, beriman dan taqwa (*sradha-bhakti*) kepada Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, berbudi luhur, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
- b. Penguatan kebudayaan Bali sehingga mampu sebagai filter terhadap pengaruh negatif budaya global, dan mengadopsi budaya positif-produktif.
- c. Terwujudnya hubungan sosial antarkelompok yang ada dalam masyarakat secara harmonis sehingga dapat memperkuat kebersamaan dan jati diri orang Bali.
- d. Pemanfaatan dan pelestarian warisan budaya yang bersifat *tangible*, *intangible*, dan abstrak secara seimbang dan berkelanjutan. Aset budaya tersebut agar dapat dikelola dengan baik dan terjangkau secara adil sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan secara optimal dan berkelanjutan.
- e. Mengembangkan budaya yang berbasis multikultur, mengingat masyarakat Bali kini semakin heterogen akibat dari perkembangan industri pariwisata dan kehadiran para tenaga kerja dari etnis non Bali. Pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan diarahkan untuk (a) memperkuat integrasi bangsa dan toleransi antaretnik di Bali; (b) pengembangan budaya inovatif yang berorientasi kepada iptek dan kesenian yang beradab; (c) terwujudnya hubungan sosial antarkelompok yang ada dalam masyarakat secara harmonis sehingga memperkuat kebersamaan dan kebalikan orang Bali; dan (d) terfasilitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajar (*learning culture*) yang berorientasi iptek dan kesenian sehingga mampu mendukung upaya untuk peningkatan peradaban masyarakat.
- f. Pembinaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Bali sebagai media kebudayaan Bali.
- g. Pembinaan, pelestarian, dan pengembangan organisasi tradisional seperti: banjar, desa pakraman, subak, dan lain-lain yang berfungsi sebagai penyangga kebudayaan Bali.
- h. Pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian Bali yang menjadi keunikan kebudayaan Bali.
- i. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dalam pembangunan yang berbasis etika sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan

berwibawa. Di samping itu, perlu kiranya dioptimalkan upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama di masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun perlu lebih ditingkatkan, demikian pula, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) yang diharapkan masyarakat dan bangsa Indonesia belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum birokrat maupun anggota legislatif.

4.2.3 Mewujudkan Keamanan Daerah dan Masyarakat Bali yang Berkeadilan serta Demokratis.

- a. Pembangunan jangka panjang di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban diarahkan pada peningkatan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan keamanan di masyarakat dilaksanakan melalui penerapan sistem keamanan terpadu dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan komponen terkait lainnya, pengembangan perangkat keras maupun perangkat lunak.
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban dapat ditempuh dengan peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum (tertulis maupun tidak tertulis) dan memantapkan pengawasan baik dari atas (*top down*) maupun dari bawah (*bottom up*).
- c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan serta perlindungan hukum, penurunan tindak kekerasan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang. Selain itu perlu disertai penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- d. Penyempurnaan struktur politik diarahkan pada proses pelembagaan demokrasi, mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan konstitusi yang kuat dan kredibilitas yang tinggi sebagai pedoman dasar bagi proses demokrasi berkelanjutan, menata hubungan antara kelembagaan politik di daerah dengan lembaga pertahanan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Disamping itu, diarahkan juga untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, mencegah disintegrasi dan perpecahan di daerah, mewujudkan rekonsiliasi daerah dan nasional secara berkelanjutan, serta membentuk pelembagaan lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokratis secara berkesinambungan.
- e. Penataan peran pemerintah daerah dan masyarakat diarahkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Penataan peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi lembaga tradisional dan pranata-pranata kemasyarakatan yang positif, lembaga hukum dan lembaga politik untuk

pembangunan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan berbagai potensi konflik di daerah yang bersifat merusak.

- f. Pengembangan budaya politik diarahkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis, dengan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Azasi Manusia, nilai-nilai persamaan (termasuk nilai-nilai kesetaraan gender), anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik melalui berbagai wacana, media dan dialog untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya memelihara persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Pengembangan proses politik diarahkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan melalui peningkatan secara terus menerus proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik, serta calon pemimpin daerah, perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan kebebasan berpendapat setiap warga negara dan warga masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya yang muncul dari hati nurani masing-masing.
- h. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi diarahkan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga; menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara cerdas dan demokratis; mewujudkan pemerataan informasi ditingkat daerah, nasional dan global dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah secara bebas dan bertanggungjawab; mencegah monopoli dalam bidang penyiaran; serta menciptakan jaringan komunikasi dan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami dan lebih dapat diterima oleh masyarakat luas.
- i. Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik di daerah, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya peraturan-peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota serta hukum adat yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup materi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, dalam rangka mewujudkan negara hukum dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
- k. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak azasi yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional dan sistem hukum lokal (adat) yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.
- l. Pembangunan materi hukum dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-produk hukum tertulis (perda) melalui

pembaruan/penyesuaian dengan kebutuhan perkembangan zaman dan mempertahankan serta memberdayakan hukum adat sebagai sistem hukum tidak tertulis, sepanjang hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokratis, serta kepatutan sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Agama Hindu. Perencanaan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan materi hukum, diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal yang dilakukan secara terpadu, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- m. Pembentukan hukum dilakukan secara terpadu dan demokratis untuk menghasilkan produk hukum yang dapat diaplikasikan pelaksanaannya secara efektif, dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- n. Penelitian/pengkajian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan, sehingga produk hukum di daerah (Perda maupun hukum adat) akan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum dan pengembangan hukum, dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme para peneliti hukum dan mengadakan kerjasama antara berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
- o. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan fungsi-fungsi berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan-badan peradilan di daerah, sehingga aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab, profesional serta dilandasi moral yang baik, untuk mewujudkan ketertiban, keadilan (termasuk didalamnya keadilan gender), kepastian hukum, dan memberi rasa tantangan bagi masyarakat.
- p. Pembangunan budaya patuh hukum dilakukan dengan mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dengan memberikan akses untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan; memberikan akses kepada masyarakat untuk melibatkan diri (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga setiap warga negara dan warga masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Perwujudan masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi; harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya terjangkau; proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, sehingga masyarakat terdorong untuk mengembangkan budaya patuh hukum.
- q. Penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas, dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan, serta terbuka, dalam

rangka mewujudkan ketertiban dan disiplin sehingga dapat mendukung pembangunan dan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis.

- r. Pemantapan fungsi lembaga peradilan yang ada di daerah termasuk didalamnya fungsi peradilan desa perlu dilakukan secara berkesinambungan, supaya pengembangan lembaga peradilan, peningkatan kualitas dan profesionalisme para hakim (termasuk hakim perdamaian desa), dukungan sarana dan prasarana dalam semua lingkungan peradilan yang ada di daerah, dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.
- s. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diarahkan pada upaya untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju *one island one management* dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta penanggulangan masalah penyalahgunaan wewenang termasuk KKN, peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- t. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan wewenang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta semua kegiatan; pemberian sanksi yang pantas kepada para pelaku penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, fungsional, dan pengawasan dari bawah (oleh rakyat); peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan di daerah terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.
- u. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan diarahkan pada penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan di daerah agar lebih memadai, luwes, efisien, responsif; peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur administrasi pemerintahan; penataan dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat; peningkatan kesejahteraan pegawai; dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dan berkeadilan gender.
- v. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dicapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat mandiri berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
- w. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada tewujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan nasional.

4.2.4 Mewujudkan Masyarakat Bali yang Sejahtera

- a. Bali dengan sumberdaya pertanian, kepariwisataan yang didukung kreativitas masyarakat berbudaya tinggi, dan industri kecil berkeunggulan kompetitif dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, diarahkan melakukan pengembangan berdasarkan pengelolaan secara efisien dan rasional, memperkuat kemampuan jaringan Informatika dan Komunikasi (INFOKOM), serta memperkuat integrasi dan keterkaitan antarindustri. Dalam rangka memperkuat daya saing nasional dan global, kebijakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan industri kecil diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi.
- b. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola melalui pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, dengan melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan sehingga terbentuk pola klaster yang mantap. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan pada umumnya, upaya ini bermanfaat di dalam menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan.
- c. Sistem ketahanan pangan daerah Bali perlu dikembangkan untuk mencapai kemandirian pangan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dengan cara memperluas dan memperkuat basis produksi. Kondisi ini bersifat sangat strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali, sekaligus merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan industri, yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan konservasi budaya dan sumberdaya alam Bali. Ketahanan pangan ditingkatkan dengan perluasan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Peningkatan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah bersama masyarakat. Peranan pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Ketahanan pangan diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas bahan pangan. Produksi dan konsumsi berbagai komoditas pangan lokal ditingkatkan (diversifikasi pangan) berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya, efektivitas dan efisiensi distribusi pangan ditingkatkan, akses masyarakat terhadap bahan pangan diperluas, kemampuan penyediaan pangan (jumlah, mutu, dan ragamnya) ditingkatkan, kemampuan penyediaan cadangan pangan ditingkatkan, dan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi ditingkatkan.
- d. Penguatan lembaga ekonomi, dapat menjamin peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi melalui persaingan sehat guna meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan. Arah pembangunan jangka panjang penguatan lembaga ekonomi dilakukan melalui: (1) pembangunan agropolitan terutama pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) pertanian; (2) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; (3) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan

ekonomi komplementer yang saling menguntungkan; (4) peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja; dan (5) intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

- e. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif, serta menjaga persaingan usaha secara sehat dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Disamping itu, mendorong pengembangan standarisasi produk untuk meningkatkan daya saing serta merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai kebijakan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) yang menjadi bagian integral keseluruhan kegiatan ekonomi. Perekonomian Bali dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan yang sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan sosial, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan secara cermat dinamika global, komitmen nasional, dan kedaulatan ekonomi daerah dalam menjaga kepentingan strategis dan kedaulatan ekonomi bangsa serta berbagai bentuk perjanjian ekonomi internasional. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan diupayakan guna berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan, serta perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang tepat sasaran baik dari segi jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme yang transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha yang berdasar persaingan secara sehat pada setiap segmen perekonomian.
- f. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi, serta program pendampingan atau kemitraan. Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis industri dan daya saing industri melalui pola pengembangan klaster, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro dan kecil menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi dikembangkan sebagai wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- g. Pariwisata budaya dikembangkan secara berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu mendorong peningkatan daya saing dan peningkatan kualitas perekonomian regional.
- h. Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah dikelola agar kompetitif dan sehat sebagai salah satu pilar peningkatan daya saing daerah, nasional dan global melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah, dengan pola kebijakan yang tidak distortif terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan infrastruktur fisik, serta ekonomi dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan kompetensi. Pengembangan industri kecil dan menengah perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi sumberdaya lokal. Kebijakan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya saling terkait.
- i. Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi. Seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai daerah tujuan wisata dan daerah agraris, yang disesuaikan dengan kompetensi dan keunggulan daerah, baik pada sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, maupun sektor industri kecil dan menengah, serta jasa. Peningkatan daya saing global perekonomian dikembangkan pula melalui pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) dengan bertumpu pada pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi, penguatan termasuk didalamnya perluasan dan pendalaman struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antar dan inter industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait, serta membangun fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif. Pembangunan pondasi ekonomi mikro dilakukan melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif dan penguatan kelembagaan ekonomi. Penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai daerah tujuan wisata dan pertanian, yang disesuaikan dengan kompetensi dan keunggulan daerah, baik pada sektor pertanian dalam arti luas, jasa pariwisata, maupun pada sektor industri kecil.
- j. Dalam rangka memperkuat daya saing daerah, nasional dan global, kebijakan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya saling terkait. Kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan yang efisien, memperkuat posisi Bali dalam berbagai bentuk perdagangan nasional dan global, pengembangan citra produk daerah Bali yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar lokal, nasional, dan global. Sementara itu kepentingan investasi adalah menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai regulasi terkait, serta pengembangan berbagai

paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing.

- k. Kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan yang efisien, memperkuat posisi Bali dalam berbagai bentuk perdagangan nasional dan global, pengembangan citra produk daerah Bali yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar lokal, nasional, dan global. Perdagangan dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing global. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat efisiensi sistem perdagangan dalam negeri dan memperkuat posisi daerah dalam aktivitas perdagangan serta berbagai forum kerjasama perdagangan antardaerah dan global. Disamping itu, juga memperkuat citra produk daerah yang berkualitas internasional dan mampu mendorong integrasi kegiatan ekonomi nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan yang kuat dan efisien, memperkuat posisi Bali dalam berbagai bentuk perdagangan antardaerah dan global, pengembangan citra produk daerah Bali yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global.
- l. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang menguntungkan semua pihak, merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumberdaya manusia. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.
- m. Investasi akan dikembangkan dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, guna membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan investasi disesuaikan dengan daya dukung wilayah Bali yang amat terbatas, antara lain investasi di bidang industri pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas. Peningkatan iklim investasi yang kondusif diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi antarwilayah dan antarsektor yang cukup tinggi secara berkualitas dan berkelanjutan, melalui kemudahan berbagai regulasi terkait dan pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif, selaras dengan arah peningkatan daya saing.
- n. Jasa dikembangkan sebagai pendorong dengan peningkatan pengembangan sektor unggulan daerah, dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mengurangi tekanan pada sektor pertanian, antara lain dalam bidang

jasa pariwisata, jasa keuangan, jasa infrastruktur, jasa di bidang ketrampilan (misalnya keperawatan dan keteknikan), terutama untuk menggali potensi-potensi sektor jasa di daerah dan mengisi peluang kerja di luar negeri.

- o. Pengembangan keuangan oleh pemerintah diarahkan pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Sumber utama keuangan daerah yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik, serta ekonomi dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
- p. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pembiayaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis, melalui: (1) implementasi sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia, (2) peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, dan (3) peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional. Dengan demikian, setiap jenis investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- q. Upaya perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk mendorong pasar kerja yang fleksibel, termasuk penurunan biaya ekonomi tinggi agar tercipta sebanyak mungkin lapangan pekerjaan formal, tanpa merugikan pekerja informal. Disamping itu, memfasilitasi agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan yang rendah produktivitasnya ke pekerjaan yang lebih tinggi produktivitasnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

4.2.5 Mewujudkan Pembangunan Bali yang Lestari, Handal dan Merata

- a. Pengembangan wilayah dan pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) dan lingkungan hidup harus menuju kepada tatanan masyarakat Bali yang *ajeg* dalam wujud pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan lingkungan hidup di Bali harus dipandang dalam satu kesatuan ekosistem pulau (*one island, one plan, one management*). Pembangunan Bali berkelanjutan selalu diasosiasikan dengan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.
- b. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; sumberdaya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Pengelolaan sumberdaya alam terutama diarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaannya, sedangkan terhadap komponen lingkungan hidup kegiatan perlu diarahkan pada perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan lingkungan dalam wujud “Program Bali Hijau” dan program lainnya perlu disosialisasikan terus serta didukung oleh penyediaan perangkat regulasi yang memadai. Arah kebijakan lingkungan hidup yang ditempuh adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam, keanekaragaman hayati (biodiversitas), tata ruang, dan lingkungan hidup melalui pemantapan kawasan lindung dan budidaya, pengendalian produksi, konsumsi dan aktivitas yang ramah lingkungan.

- c. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan suatu kesatuan “ekosistem pulau”. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan pemerintah daerah atas sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Bali harus selalu mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat sehingga keberlanjutan fungsi lingkungan dapat dipertahankan. Disamping itu, SDA dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kemakmuran, ketahanan nasional, dan lingkungan guna mencegah serta mengatasi berbagai kritis dan konflik di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh persaingan atas pemanfaatannya serta permasalahan sosial lainnya.
- d. Pembangunan yang ramah lingkungan diterapkan juga pada pembangunan bidang ekonomi sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Integrasi prinsip-prinsip valuasi ekonomi ke dalam setiap kebijakan pembangunan menjadi sangat penting. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- e. Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk SDA, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap

menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Disamping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi di daerahnya. Pemanfaatan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pengelolaan SDA terbarukan yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan, agar SDA tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya serta memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Hasilnya diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuh-kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

- f. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi SDA lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan SDA yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan SDA yang ada, antara daratan dan lautan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan nasional, kebijakan daerah, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
- g. Pemanfaatan terhadap SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan.
- h. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan reboisasi lahan kritis dalam kawasan hutan untuk mencapai tutupan lahan seluas 30% dari luasan DAS disamping upaya memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya. Konservasi sumber daya dan memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya. Konservasi sumberdaya hayati dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengembangan biodiversitas yang dilindungi dan endemik sesuai dengan perundang-undangan. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan kepada strategi pengelolaan DAS secara terpadu, rehabilitasi DAS yang kritis, dan pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan daya dukung dan kebutuhan. Mengurangi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dan menurunkan tingkat bahaya erosi sampai tingkat erosi yang dapat ditoleransi.
- i. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, luasan hutan pengelolaan lingkungan diarahkan kepada kebijakan pemanfaatan ruang baik untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan kinerja lembaga pengendali pemanfaatan ruang dan menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebanyak 30%,

dan konservasi kawasan DAS melalui peningkatan kualitas hutan sebanyak minimal 30%. Pengelolaan RTH mempertimbangkan mekanisme saling menguntungkan bagi pengguna, pemilik, dan pemerintah.

- j. Arah kebijakan pembangunan kawasan pesisir diupayakan untuk mengatasi bahaya intrusi air laut dengan cara mengurangi dan mencegah bahaya instrusi laut dikawasan pantai, mengurangi dan mengendalikan penurapan air tanah di pantai, dan menerapkan sempadan pantai sesuai peraturan daerah secara konsisten. Perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan pantai, pembangunan fisik yang menyangkut rehabilitasi pantai-pantai yang rusak serta pengendalian pencemaran oleh berbagai aktivitas baik di pantai maupun di hulu sungai.
- k. Petani pemakai air (anggota *subak*) ditempatkan sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan prinsip demokratis, transparan, dan memanfaatkan potensi dan budaya lokal, dengan dukungan fasilitasi dan bantuan pendanaan dari pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberdayakan petani dalam bidang teknis, organisasi, dan manajemen sehingga dapat menunjang pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan irigasi. Pembangunan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sebesar 50,5 m³/detik, untuk 20 tahun kedepan merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Sumber-sumber air yang mencakup 1321 mata air di 546 lokasi dengan debit berkisar 0,04 liter/detik – 589 liter/detik, jumlah sungai 247 buah termasuk anak sungai (162 buah mengalir ke laut) dengan arah aliran terbagi dua yaitu mengalir ke arah utara dan selatan, 4 buah danau alam serta beberapa danau buatan (waduk) dan penampung air lainnya agar dikelola berdasarkan konsep "*one island, one plan, one management*" yaitu satu pulau satu perencanaan dan satu pengelolaan secara terpadu dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang DAS dari hulu sampai hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antarsektor, antarinstansi, serta antarwilayah kabupaten/kota dan wilayah sungai yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antarpihak yang berkepentingan dan mencegah konflik horizontal dan vertikal. Pemanfaatan ABT sebagai sumber air dikelola dengan mempertimbangkan daya dukung dan melaksanakan penegakan hukum untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan.
- m. Pengembangan wilayah, sungai, danau, dan DAS dilakukan dengan menurunkan tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran air pada musim kemarau dan musim hujan, menjaga dan mestabilkan kuantitas dan kualitas air, melestarikan daerah tangkapan air, menyediakan bangunan pengendali sedimen, menyediakan waduk-waduk dan embung untuk memenuhi kebutuhan air pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi. Fungsi air sebagai *social goods*

dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- n. Pembangunan sistem transportasi regional Bali perlu diintegrasikan dengan pengembangan tata ruang wilayah serta diarahkan untuk mengurangi beban pergerakan pada wilayah Bali bagian Selatan dan lebih memberdayakan wilayah Bali bagian Utara (termasuk bagian Timur dan Barat). Hal ini perlu dilakukan melalui penambahan jaringan jalan pendukung pesisir Timur dan peningkatan jalan pesisir Utara sebagai jalan primer dengan mengembangkan poros Utara-Selatan lainnya; peningkatan aksesibilitas di dalam wilayah Bali untuk mengembangkan wilayah dan mengoptimalkan potensi wilayah terutama Bali Utara serta penambahan jaringan jalan penghubung Selatan-Utara untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan penataan simpul-simpul transportasi di Bali (terminal, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara) perlu diarahkan untuk mendukung efisiensi pergerakan sistem transportasi dan pengembangan wilayah. Pembangunan simpul-simpul tersebut perlu pula mempertimbangkan besarnya beban yang akan ditampung oleh sistem jaringan transportasi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Pembangunan sistem transportasi perkotaan di Bali perlu diarahkan untuk meningkatkan pangsa pasar pengguna angkutan umum mencapai sebesar 50% dari total pelaku perjalanan harian. Hal ini guna mewujudkan angkutan umum sebagai inti sistem transportasi kota. Untuk itu, selain peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum melalui pemberian insentif bagi angkutan umum, perlu pula dikembangkan kebijakan sistem disinsentif bagi kendaraan pribadi dalam upaya mengurangi beban jalan dan kepadatan lalu lintas di perkotaan sebagai akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Dalam kerangka pembangunan transportasi perkotaan di kawasan SARBAGITA, pembangunan angkutan umum perlu dilakukan dalam satu payung pengelolaan.
- o. Pembangunan sarana prasarana transportasi terpadu antarwilayah, antar dan inter moda sebagai satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi dengan pengembangan Pelabuhan Amed sebagai akses keluar masuk Bali melalui jaringan lintas Bali Utara (Ketapang/Pulau Jawa-Gilimanuk-Singaraja-Amed-Ampenan/Lombok), pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo sebagai akses keluar-masuk Bali melalui Bali Timur, Pembangunan Pelabuhan Gunaksa sebagai akses angkutan penyeberangan ke Nusa Penida dan peningkatan kapasitas jaringan prasarana jalan pembangunan jaringan jalan baru maupun peningkatan kapasitas fasilitas operasional pada simpul-simpul transportasi yang telah tersedia. Peningkatan kapasitas, kualitas dan aksesibilitas pelayanan angkutan penumpang umum perkotaan (SARBAGITA) melalui perbaikan jaringan trayek, restrukturisasi tarif dan manajemen pengelolaan.
- p. Peningkatan disiplin dan tertib lalu lintas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas terkait dengan kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi.

- q. Untuk memenuhi kebutuhan minimal 50% masyarakat yang belum terlayani air minum sampai tahun 2025, kebijakan dan program penyediaan air minum di Provinsi Bali melalui beberapa program antara lain : a) meningkatkan cakupan pelayanan air minum, b). melestarikan dan memelihara pembangunan sarana air bersih yang telah dibangun, c) meningkatkan ketersediaan air baku bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan miskin, kritis air, rawan penyakit, wilayah terpencil dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan air minum, d) mengupayakan keseimbangan pelayanan bagi kab/kota secara regional untuk memenuhi *supply* dan *demand* terhadap kebutuhan air minum. Untuk kawasan metropolitan SARBAGITA dalam memenuhi kekurangan air minum pada tahun 2005-2025 dilakukan kerjasama secara regional pada kawasan Bali Selatan yang meliputi kawasan SARBAGITAKU (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung). Sehingga pada tahun 2025 target yang dapat terlayani air minum untuk kawasan perkotaan diharapkan sebesar 90%, wilayah IKK sebesar 82% dan untuk wilayah perdesaan sebesar 80%. Untuk memenuhi target tersebut serta dengan memperhatikan kondisi masing-masing wilayah kabupaten/kota dimana potensi dan sebaran air baku tidak merata antar masing-masing kabupaten/kota upayakan melalui kerjasama secara regional dalam memproduksi air minum dengan melakukan sharing anggaran melalui investasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat serta pihak swasta. Untuk kawasan selain SARBAGITAKU dirintis kerjasama dalam pemecahan permasalahan air minum secara regionalisasi dalam penyediaan air baku, pembuatan sumur bor dalam, serta tetap menjaga potensi air baku melalui penanganan DAS secara terintegrasi antara kabupaten/kota se Bali.
- r. Penanganan sampah di Provinsi Bali diarahkan pada pola kerjasama secara regional antara kabupaten/kota se Bali untuk meningkatkan efisiensi. Khusus penanganan sampah untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA) sampai tahun 2025. Pemerintah SARBAGITA dan Provinsi Bali telah melakukan kerjasama dengan dengan pihak swasta untuk penanganan sampah. Melalui kerjasama tersebut pihak Pemerintah SARBAGITA diwajibkan memenuhi *supply* sampah secara kontinyu dengan volume yang telah disepakati setiap hari. Penanganan sampah akan diarahkan pada penggunaan sistem *sanitary landfill construction* untuk memperkecil pencemaran lingkungan, dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pola 3R.
- s. Pengelolaan air limbah (*sewerage system*) pada kawasan yang tidak terjangkau sistem terpusat (*of site*) diarahkan menggunakan sistem setempat (*on site*) antara lain dengan sistem IPAL komunal melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (sanimas). Pengembangan pelayanan sistem perpipaan, air limbah seperti DSDP, *sewerage system* di Ubud dan penanganan air limbah pada kawasan tertentu diarahkan melalui pengembangan secara regional serta melalui DSDP III setelah dilakukan kajian secara menyeluruh. Cakupan pelayanan DSDP pada kawasan Denpasar, Sanur dan Kuta melalui DSDP I dan DSDP II sebanyak 21.856 sambungan rumah (SR) dengan jumlah terlayani sebanyak 355.800 jiwa.

- t. Penanganan pencemaran air, tanah, dan udara, diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum dengan prinsip siapa yang mencemari harus membayar atau *polluter pays principle*, dan pengarusutamaan kepentingan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
- u. Pembangunan drainase diarahkan untuk memperkecil potensi terjadinya banjir, menjaga serta melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air baku dari pencemaran limbah padat dan cair, memperkecil infiltrasi toksin kedalam tanah yang dapat berakibat pada kualitas air tanah melalui perbaikan fungsi ekologis pada kawasan hulu, mempertahankan kawasan resapan air (*catchment area*) dan tetap mempertimbangkan pembangunan drainase berdasarkan keseimbangan tata air.
- v. Pembangunan telematika diarahkan pada perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Disamping itu, pembangunan telematika diarahkan pada penetapan *platform* kompetisi jangka panjang dalam penyelenggaraan telekomunikasi meliputi (1) antisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, teknologi industri dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; (2) pemanfaatan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; serta (3) peningkatan pengetahuan dan *awareness* masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- w. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi; peningkatan sarana dan prasarana produksi; peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan energi. Pembangunan energi juga diarahkan pada peningkatan intensitas pencarian sumber-sumber energi sejalan dengan peningkatan populasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pengembangan energi juga dicapai melalui penentuan harga energi yang telah memperhitungkan biaya produksi dan daya beli masyarakat. Pembangunan energi diarahkan kepada penganekaragaman (*diversifikasi*) energi serta konservasi energi. Pengembangan energi dilaksanakan juga dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimal bagi tiap jenis energi.
- x. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tahun 2025 akan mencapai kebutuhan sebesar 2 GW, dengan melakukan peningkatan kualitas, kuantitas, dan jangkauan sistem jaringan transmisi dan distribusi secara terintegrasi agar mampu menyediakan tenaga listrik yang handal dan berbasis teknologi informasi. Arah pengembangan meliputi: (1) penyediaan

tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat; (2) penyempurnaan struktur industri penyediaan tenaga listrik, yang memberikan peluang lebih luas bagi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, terarah, dan terpisah dari misi sosial untuk wilayah non-komersial; (3) penyempurnaan kebijakan tarif dan subsidi di mana penyempurnaan tarif diarahkan pada penerapan tarif regional yang strukturnya disesuaikan dengan Harga Penetapan Pemerintah (HPP) bagi setiap kelompok pelanggan, sedangkan subsidi diarahkan kepada optimalisasi dan pengembangan interkoneksi jaringan penyaluran yang lebih luas dan lebih optimal untuk mengurangi hambatan penyaluran, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi berbagai bentuk *losses*; (4) peningkatan manajemen pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi: *good governance*, kemampuan manajemen dan penataan sistem organisasi; (5) diversifikasi energi untuk pembangkit listrik, seperti panas bumi, mikro hidro, gas, dan batu bara, juga dapat diterapkannya pembangkit listrik tenaga surya, angin dan gelombang; (6) pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis *transfer knowledge* termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan.

- y. Arah kebijakan terhadap fenomena perubahan iklim global dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan revitalisasi kearifan lingkungan untuk mengurangi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan emisinya.
- z. Mitigasi bencana diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk deteksi dini bencana (tsunami, serta bencana alam lainnya), dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana.

4.3 TAHAPAN DAN PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana tersebut diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan, mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam lima misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dikelompokkan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan, seperti diuraikan di bawah ini.

4.3.1 RPJMD tahap I

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM tahap I diarahkan untuk: memantapkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mewujudkan ketahanan pangan, mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, penguasaan,

pemanfaatan dan penerapan IPTEK, meningkatkan perolehan HKI, pelestarian kebudayaan daerah, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan penataan ruang, mitigasi bencana alam, meningkatkan keamanan/ketentraman/ketertiban, dan penegakan hukum.

4.3.2 RPJMD tahap II

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD tahap I, RPJMD tahap II ditujukan untuk lebih memantapkan layanan sosial dasar dan pengentasan kemiskinan serta menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, dalam periode ini akan diprioritaskan pula penguatan daya saing perekonomian daerah Bali dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Selanjutnya, akan diprioritaskan pula pengembangan sarana prasarana infrastruktur.

4.3.3 RPJMD tahap III

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan RPJMD tahap II, RPJMD tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

4.3.4 RPJMD tahap IV

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan RPJMD tahap III, RPJMD tahap IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pada periode ini diharapkan akan terwujud Bali Dwipa Jaya yaitu masyarakat Bali yang unggul, adil, demokratis, dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

RPJPD Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan merupakan pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, baik sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah, maupun sebagai pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

RPJPD juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJMD untuk lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk satu tahunan. Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, perlu di dukung oleh: (1) komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA